

PERJALANAN MENUJU LINGKUNGAN BEBAS ASAP: PERAN INDONESIA DALAM ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION

Aisha Nafitra Putri Yandri¹⁾, Rachel Bianca Theresia Hutapea²⁾, Timothy³⁾, Yumi Jocelin Sugiyama^{4)*}

¹⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

³⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

⁴⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: 01043210077@student.uph.edu¹⁾, 01043210070@student.uph.edu²⁾, 01043210078@student.uph.edu³⁾,
01043210080@student.uph.edu^{4)*}

ABSTRACT

This paper examines Indonesia's participation dynamics since ratifying the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) and its contributions to environmental diplomacy. It delineates two main areas: bureaucratic/technical diplomacy and political leadership diplomacy. At the bureaucratic level, Indonesia has engaged significantly in international forums, notably by elevating the haze pollution issue in the ASEAN Ministerial Meetings on Environment and collaborating with Singapore on technological solutions. However, at the political leadership level, Indonesia's focus on international performance, as evidenced by the new Capital city Nusantara project, has hindered the effective implementation of AATHP principles domestically. Recommendations for AATHP and Indonesia's future contributions include expanding the role of Non-Governmental Interests (NGIs) to enhance treaty legitimacy, balancing scientific and political enforcement, and promoting media involvement for public awareness and scrutiny. By adopting these recommendations, Indonesia and ASEAN nations can effectively mitigate transboundary haze pollution in Southeast Asia.

Keywords: ASEAN, Diplomacy, Environment, Haze Pollution, Indonesia

1. Pendahuluan

Isu tentang lingkungan hidup tidak mengenal batas dan diplomasi adalah alat yang dapat digunakan untuk melampaui batas-batas tersebut. Hanya dalam kurun waktu beberapa dekade, dunia telah mengalami transformasi besar dalam bidang isu lingkungan. Apa yang tadinya hanya sekadar peringatan, kini telah menjadi sebuah kenyataan sehari-hari yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia. Pergeseran ini menggarisbawahi kebutuhan yang mendesak akan adanya kerja sama dan diplomasi internasional untuk mengatasi permasalahan lingkungan secara efektif, yang sebagian besar bersifat lintas batas. Melalui pemahaman tersebut, lahirlah “diplomasi lingkungan” yang dalam studi bidang Hubungan Internasional secara umum mengacu pada negosiasi antarnegara mengenai tata kelola lingkungan (Ali & Vladich, 2016). Dalam hal diplomasi lingkungan, konferensi hingga perjanjian

bilateral, regional, dan bahkan multilateral telah menjadi bukti langsung adanya komitmen negara untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang sedang berlangsung.

Bagi negara-negara di Asia Tenggara, diplomasi lingkungan bukanlah sesuatu yang baru di kerangka organisasi regional mereka, yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Upaya diplomasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa banyak tantangan lingkungan hidup di Asia Tenggara yang bersifat lintas batas, sehingga berdampak pada banyak negara dan memerlukan kerja sama regional. Diplomasi lingkungan di kawasan Asia Tenggara pun mulai diperbincangkan di ASEAN pada tahun 1980-an dan 1990-an, karena adanya peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan Timur, Indonesia. (Siddiqui & Quah, 2004). Laporan dari tragedi menunjukkan bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan

dan menyebabkan polusi yang menduduki rekor terbesar kedua kebakaran hutan di dunia, yang tercatat menghancurkan hingga 3,5 juta hektar hutan di daerah tersebut serta mengantarkan polusi kabut asap ke negara-negara tetangganya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan bahkan Filipina (Febriyani, 2019). Menindaklanjuti permasalahan tersebut, ASEAN pun pada tahun 1995 mengeluarkan salah satu produk diplomasi lingkungan pertama mereka, yang diberikan nama, ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution (ACPTP). ACPTP ini secara khusus membahas tentang polusi atmosfer lintas batas dan menetapkan prosedur serta mekanisme untuk kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN dalam hal pencegahan terhadap kebakaran hutan. Sayangnya, tidak lama setelah penerapan ACPTP, ASEAN menemukan dirinya berada di jalan buntu, tanpa adanya kemajuan dalam mengatasi permasalahan polusi asap. Hal ini mengingat bahwa ACPTP merupakan rencana *non-binding* yang tidak memiliki rangka penegakan hukum sama sekali dan dengan demikian, sangat bergantung pada kerja sama dan implementasi sukarela negara-negara anggotanya.

Memasuki akhir tahun 1990-an, adanya eskalasi permasalahan polusi kabut asap lintas negara di kawasan Asia Tenggara, semakin menekan ASEAN untuk membuat terobosan baru dalam diplomasi lingkungan regionalnya. Menanggapi krisis tersebut, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa polusi kabut asap lintas batas harus dimitigasi melalui upaya nasional dan kerja sama internasional dengan mekanisme hukum yang kuat. Maka dari itu, melalui konferensi yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, hampir seluruh anggota negara ASEAN sepakat untuk meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tahun 2002. Perjanjian ini merupakan upaya diplomatik penting yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kabut

asap melalui kerja sama regional yang bersifat *legally binding*. Dengan begitu, mewakili respons kolektif negara-negara Asia Tenggara terhadap tantangan lingkungan hidup yang mendesak dan menggarisbawahi pengakuan kawasan akan perlunya inisiatif diplomatik untuk mengatasi masalah lingkungan bersama secara efektif (ASEAN, 2002).

Meninjau tahapan awal dari implementasi AATHP di kawasan Asia Tenggara, satu hal yang kerap kali disorot dalam ranah diplomasi lingkungan adalah ketidakhadiran Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia merupakan kontributor terbesar dari hadirnya permasalahan polusi kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan kegagalan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan di tahun 1997 yang menghancurkan 11,7 juta hektar hutan dan lahan, sebuah kebakaran hutan yang hampir tiga kali lipat lebih besar daripada kebakaran hutan beberapa tahun sebelumnya (Suryani, 2012). Nyatanya banyak pengamat dan kritikus memiliki harapan besar bahwa Indonesia, dengan keterbatasannya dalam menanggulangi permasalahan lingkungan di negaranya, akan dengan mudah merangkul dan mendukung AATHP sebagai produk signifikan dari diplomasi lingkungan. Namun, pada akhirnya mereka harus menerima kejutan yang berkontradiksi dengan harapan mereka, saat Indonesia memutuskan untuk menunda ratifikasi terhadap AATHP dan baru meratifikasinya di tahun 2014, sebagai negara terakhir yang meratifikasi AATHP (Hurley & Lee, 2020). Keterlambatan ratifikasi tersebut telah menimbulkan beberapa pertanyaan dan mengumpulkan perhatian substansial dari komunitas internasional mengenai komitmen Indonesia dalam permasalahan lingkungan yang dianggap bukan hanya merugikan negaranya, namun juga negara tetangganya.

Di tengah persepsi buruk terhadap komitmennya untuk lingkungan dan fakta

bahwa Indonesia merupakan negara terakhir yang meratifikasi AATHP, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mencoba untuk memainkan peran penting dalam implementasi perjanjian AATHP dan dalam menangani polusi kabut asap lintas batas di wilayah Asia Tenggara, melalui langkah diplomasi lanjutannya dan juga langkah domestiknya. Pada tahun 2016, Indonesia mulai memberlakukan kerangka kerja legislatif seperti peraturan tentang pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan tanah untuk menegakkan langkah-langkah terhadap kegiatan penyebab kabut asap. Indonesia juga secara aktif mulai berkolaborasi dengan negara anggota ASEAN lainnya di bawah kerangka kerja AATHP demi mengembangkan dan menerapkan strategi untuk pencegahan polusi kabut asap.

Meninjau dari berbagai pemahaman historis sebelumnya, sebagaimana yang sudah disampaikan, penulis menyadari bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang-ulang kali di Indonesia, bahkan hingga saat ini, telah menjadi permasalahan serius yang mengganggu kehidupan di Indonesia dan bahkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa AATHP sebagai produk dari diplomasi lingkungan yang difasilitasi oleh ASEAN merupakan bentuk kerja sama yang dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan mekanisme penyelesaian sengketa, pertukaran informasi, dan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN, yang selanjutnya dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan hidup lintas batas. Maka dari itu, sudah semestinya setiap negara anggota ASEAN, terlebih Indonesia bersedia untuk meratifikasi AATHP. Namun sebaliknya, Indonesia membutuhkan waktu hingga 12 tahun lamanya untuk meratifikasi AATHP. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komitmen dan partisipasi Indonesia dalam berkontribusi terhadap diplomasi

lingkungan melalui AATHP serta langkah yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam kancan diplomasi lingkungan, melalui beberapa rumusan masalah. Pertama, penulis ingin mendalami komitmen Indonesia dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, termasuk potensi Indonesia dalam ranah diplomasi lingkungan hidup regional untuk mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas di Asia Tenggara. Kedua, penulis ingin membuktikan apakah partisipasi Indonesia dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* memengaruhi diplomasi lingkungan hidup regional dan berkontribusi dalam mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas di Asia Tenggara. Ketiga, penulis bermaksud menemukan rekomendasi yang dapat berpotensi untuk meningkatkan peran diplomasi lingkungan Indonesia ke depannya.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama datang dari Robertua & Sigalingging (2019) yang berjudul *Indonesia Environmental Diplomacy Reformed: Case Studies of Greening ASEAN Way and Peat Restoration Agency*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ratifikasi dan implementasi AATHP di Indonesia difokuskan pada pembahasan dua masalah mendasar dalam diplomasi lingkungan. Pertama, kesulitan dalam berkoordinasi antarnegara dan kedua, marginalisasi kebijakan lokal. Demi menjawab tujuan penulisan literatur ini, digunakanlah perspektif *English School* yang didasari dari pendekatan untuk melihat interaksi antarnegara melalui sisi kontradiksi antara pluralisme dan solidaritas, sehingga dapat membantu memecahkan sebuah dilema dalam diplomasi lingkungan, yaitu bagaimana meraih pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Benedick (1999), yang menegaskan ketidakseimbangan modal antara negara

maju dan berkembang menjadi penghalang diplomasi lingkungan. Memperkuat gagasan ini, Narain (1999) berargumen bahwa diplomasi lingkungan menjadi bisnis transaksional yang picik, didasari nilai dan prinsip yang hierarkial.

Diketahui bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara eksklusif dengan kepala Badan Restorasi Gambut Indonesia, Nazir Foead, dan kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak. Hasil analisis penelitian ini dikaji dari kedua perspektif narasumber, ditambah dengan perspektif *English School*, disertakan pandangan penulis yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah ini. Cara pandang Greenpeace, menyadari ketidaksepakatan Indonesia dalam meratifikasi AATHP, yang memakan waktu hingga 12 tahun lamanya semenjak disepakati oleh Singapura dan Malaysia. Akan tetapi, penelitian membuktikan bahwa AATHP merupakan bentuk diplomasi lingkungan yang tadinya menggunakan strategi '*naming and shaming*' menjadi pendekatan institusionalis. Didukung dari perspektif *English School*, yang menekankan kerja sama global yang komprehensif didukung dengan aktor nonnegara, khususnya *civil society organization* (CSO) lokal, merupakan pendekatan yang termuat dalam AATHP.

Dengan membandingkan kedua diplomasi lingkungan yang digunakan oleh kepala negara Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), dengan demikian dapat dipahami adanya signifikansi AATHP dalam menjawab kedua masalah dasar pada penelitian ini. SBY menggunakan proses *top down* dalam berdiplomasi dan mengimplementasikan program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) sebagai program United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yaitu target penurunan emisi karbon, membuat nama

Indonesia harum di kancah internasional. Sedangkan, Jokowi menggunakan proses diplomasi *bottom up*, dengan meratifikasi AATHP dan mengimplementasikannya dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Alhasil, penelitian ini menggarisbawahi diplomasi lingkungan Indonesia pada rezim Jokowi yaitu Global Peatland Initiatives, dengan pembentukan BRG yang fokus pada konsolidasi internal; mampu mempromosikan ratifikasi AATHP, tanpa mengorbankan perkembangan ekonomi, yakni kepentingan aktor negara.

Dapat dipahami bahwa AATHP dapat menjadi solusi bagi negara ASEAN maupun menjadi dasar acuan organisasi regional negara berkembang lainnya. Sebab, kesepakatan ini mampu menciptakan koordinasi antarnegara, ditambah marginalisasi kebijakan nasional hingga tingkat lokal. Memang AATHP mampu menjadi solusi, akan tetapi bagaimana dengan kepatuhan dan efektifitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Masih terlihat bagaimana kebijakan lokal dan pusat yang tumpang tindih terus menjadi masalah dalam mewujudkan AATHP.

Penelitian berikutnya dihasilkan oleh Raustiala (2000) yang bertajuk *Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation*. Penelitian ini membantu memberikan pemahaman atas landasan teori yang hendak dipakai. *Compliance theory* berarti aspek penting dari hasil efektivitas institusional, namun jurnal yang ditinjau ini akan memberikan pemahaman hubungan antara *compliance*, yang didefinisikan sebagai standar aturan dan kesesuaian di antara para pelaku, dengan *effectiveness* yang dimengerti sebagai standar aturan yang mampu menghasilkan perubahan perilaku (Young & Levy, 1999). Dasar kajian dari perbandingan antara dua variabel, *compliance* dan *effectiveness* ini dituangkan dalam hukum atau perjanjian internasional, yang mengindikasikan bahwa

pendekatan yang digunakan pada literatur ini adalah interdisipliner.

Masuk ke dalam pembahasan, *compliance* memang sering dilihat dari perilaku aktor yang sejalan dengan aturan perjanjian internasional (Kingsbury, 1998). Memang konsep ini sangat lugas dan *straight-forward*, sehingga sangat sulit untuk membuktikan secara empiris implementasinya. Jika diteliti, maka implementasi dari *compliance*, pada tingkat nasional berarti menggunakan legislasi domestik, perumusan regulasi, pembentukan institusi dan penegakan aturan. Sedangkan, pada Tingkat internasional berarti dengan proses meratifikasi perjanjian internasional. Pada sisi yang lain, dalam variabel kedua, *effectiveness*, bukan hanya memberikan solusi atas masalah yang terjadi, tetapi sebuah efektivitas regulasi yang dapat terlihat, yaitu perubahan perilaku dan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel jurnal ini kemudian, mengkaji teori interdisipliner ini dengan tiga teori Hubungan Internasional lainnya yaitu Realisme, Liberalisme, dan Norma Internasional. Kemudian, pengkajian *compliance* dan *effectiveness* atas bukti hukum lingkungan hidup internasional dilakukan. Berikut adalah pembangunan lima argumen dari jurnal atas hasil analisis yang berangkat dari badan penelitian multidisiplin. Pertama, arsitektur dan pelaksanaan hukum internasional. Melalui Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil 1954, yang digantikan dengan standarisasi peralatan dalam Segregated Ballast Tanks pada tahun 1978, terlihat tingkat *compliance* yang tinggi. Adanya struktur aktor swasta dalam industri tanker mendukung tingkat *compliance*, tetapi *effectiveness* dilupakan karena standar internasional tidak diimplementasikan pada regulasi lokal. Kedua, pemberlakuan System for Implementation Review (SIRs), yang memuat pengumpulan data yang kredibel

dari aktor negara, analisis dalam pertemuan para ahli, dan tinjauan pelaksanaan secara kolektif. SIRs terbukti nyata dari keberhasilan *Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer* dengan pembentukan regulasi lokal diiringi dengan revisi atas penemuan saintifik baru dan informasi teknik secara berkala.

Argumen ketiga, standar internasional dan politik atas *noncompliance*, dengan Long-Range Transboundary Air Pollution Convention of 1979 (LRTAP) menjadi dasar kajian. Marc Levy, membuktikan bahwa LRTAP dan protokolnya ini hanyalah sebuah pendaftaran normatif atas komitmen perlindungan lingkungan Eropa. Sebab *effectiveness* dari LRTAP dipromosikan oleh dorongan internal yang menderita dari hujan asam, sedangkan *compliance* negara Eropa Barat terbentuk karena Soviet dan Eropa Timur. Alhasil, *compliance* didasari standar internasional yang didasari diplomasi Perang Dingin, sedangkan *effectiveness* berangkat dari politik *noncompliance*, yaitu perubahan regulasi dalam negeri yang lebih relevan. Keempat, menggunakan aspek *binding* dan *non-binding*. Artikel jurnal ini menyimpulkan bahwa bentuk *non-binding* dari sebuah perjanjian mempromosikan *effectiveness* dan apabila sebaliknya mendukung *compliance*. Namun, Agreements to Address Marine Pollution in the North Sea menggunakan dua pendekatan ini, memberikan hasil implementasi tinjauan berkala dari aspek *non-binding* yang kelamaan bermuara kepada pembentukan regulasi *binding* di antara kesepakatan negara-negara.

Maka dari itu, Raustiala, mampu memformulasikan sebuah teori interdisipliner antara *compliance* dan *effectiveness*, yang keduanya selalu saling bertolak belakang hasilnya pada kajian perjanjian internasional terkait lingkungan. Akan tetapi, Raustiala juga memberikan perspektif baru bahwa perjanjian yang *effective*, tidak menitikberatkan pada

compliance, lama kelamaan akan membentuk perjanjian yang mempromosikan *compliance* pula. Rekomendasi yang digarisbawahi artikel jurnal ini adalah *effectiveness* dari perjanjian itu sendiri, dengan konsideran perubahan perilaku dari Tingkat akar rumput dan negara, sehingga dapat mengakibatkan kesepahaman dalam bentuk *compliance* pada tingkat internasional dengan pertimbangan lima argumen sebelumnya. Maka dari itu, hasil dari tinjauan literatur ini mampu mendukung landasan teori atas pembahasan AATHP, dengan mengimbangi *compliance* dan *effectiveness* di dalam ASEAN, khususnya Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan akan menganalisis produk diplomasi lingkungan ASEAN terkait masalah pencemaran kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, yang bernama ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), serta bagaimana komitmen dan partisipasi Indonesia dalam berkontribusi terhadap diplomasi lingkungan melalui AATHP. Maka dari itu, guna untuk mendapatkan hasil dan pembahasan yang terbaik penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadi? (Fadli, 2021). Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep yang menelusuri penjelasan *in-depth* dan *case-oriented study* (Chariri, 2009). Penelitian kualitatif ini pun berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena secara naratif serta dampak yang timbul darinya. Sedangkan, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002).

Selanjutnya, penelitian ini pun dijalankan dan diselesaikan melalui dua jenis metode yang akan berusaha untuk memahami dengan lebih dalam mengenai isu tersebut, juga untuk menggambarkan, mencatat serta menginterpretasikan isu terkait.

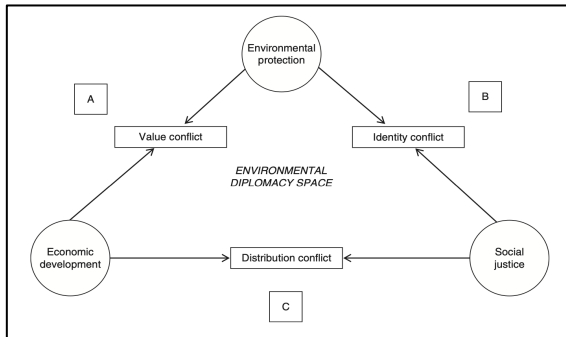
Terdapat dua metode yang digunakan dalam menunjang penelitian, yaitu metode studi kepustakaan dan pencarian daring. Metode pertama yaitu studi kepustakaan, akan berkisar pada dokumen perjanjian, buku, jurnal, dan literatur akademis lainnya. Metode kedua ialah pencarian daring, yaitu data akan diperoleh melalui media daring terpercaya yang kredibel, seperti situs lembaga pemerintahan nasional, regional, maupun internasional yang terkait dengan isu tertulis. Kedua metode penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang luas dan komprehensif, dengan data yang akurat untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam menjawab pembahasan penelitian.

4. Hasil & Pembahasan

4.1. Tantangan dan Potensi dari Komitmen Indonesia dalam AATHP

Komitmen Indonesia terhadap diplomasi lingkungan hidup di kawasan Asia Tenggara telah menjadi perdebatan banyak kalangan internasional, mengingat sikap Indonesia yang terus menunda-nunda ratifikasi AATHP hingga 12 tahun lamanya. Dalam hal ini, perlu kita pahami bahwa para pakar kajian lingkungan hidup yang bersifat interdisipliner telah lama memperlihatkan bahwa diplomasi lingkungan juga berkaitan erat dengan penyelesaian konflik atas sumber daya alam serta pemanfaatan lingkungan secara instrumental dalam menyelesaikan perselisihan dan membangun perdamaian. Melalui pemahaman tersebut, anatomi konflik lingkungan dan peluang diplomasi karya Ali (2004) dapat digunakan untuk menjustifikasi mengapa komitmen Indonesia pada awalnya tergoyahkan, serta

bagaimana konflik tersebut terpecahkan menjadi hasil potensi diplomasi yang berjalan di kancah ASEAN dalam beberapa tahun berikutnya.



Figur 4.1.1. Anatomi Konflik Lingkungan dan Peluang Diplomasi (Ali, 2004)

Keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi AATHP dapat dianalisis secara komprehensif dalam kerangka konflik lingkungan hidup dan peluang diplomasi yang diuraikan oleh Ali (2004). Penundaan ini mencerminkan konflik nilai yang berasal dari ketegangan antara prioritas perlindungan lingkungan dan kepentingan pembangunan ekonomi. Keengganan Indonesia untuk meratifikasi AATHP sebagian dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat menghambat kemajuan ekonomi, terutama di industri seperti kelapa sawit dan pertanian, yang terkait dengan polusi asap lintas batas. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa sekitaran tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an, sektor industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia sedang sangat meningkat. Sektor ini memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian di luar Jawa, memberikan peluang masuknya investasi, dan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian Indonesia saat itu (GAPKI, 2018). Maka dari itu, untuk mengatasi konflik ini diperlukan negosiasi yang mempertimbangkan nilai moneter dan nonmoneter yang terkait dengan sistem alam dan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima dalam menghadapi

kerusakan lingkungan (Ali & Vladich, 2016).

Selain itu, konflik identitas (B) mungkin juga berperan, karena komunitas minoritas dan masyarakat adat yang terkena dampak polusi asap mungkin menganggap identitas dan mata pencaharian mereka terancam oleh peraturan lingkungan hidup yang terkait dengan perjanjian tersebut. Terakhir, konflik distribusi (C) muncul dalam alokasi sumber daya alam yang langka, terutama yang relevan dalam kasus sumber daya air lintas batas. Wilayah Indonesia yang luas dan beragam, ditambah dengan kepentingan ekonomi, menambah kompleksitas konflik distribusi, karena pemerintah mungkin mulai berpikir mengenai bagaimana ketentuan AATHP dapat mempengaruhi alokasi sumber daya seperti lahan dan hutan untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi AATHP menggarisbawahi keseimbangan rumit yang harus dicapai oleh diplomasi lingkungan hidup antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, serta kepentingan dalam mengatasi konflik identitas dan distribusi untuk mencapai konsensus yang selaras dengan kepentingan negara dan tujuan lingkungan hidup yang lebih luas.

Sebagai penutup pada bagian ini, keterlambatan awal Indonesia dalam meratifikasi AATHP mungkin menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia dalam bidang diplomasi, namun jika dicermati lebih dekat akan terlihat bahwa keraguan ini didorong oleh konflik kompleks terkait pembangunan ekonomi, identitas, dan distribusi sumber daya. Namun, seiring dengan semakin kuatnya Indonesia dan kemajuan yang dicapai dalam mengatasi konflik-konflik ini, komitmen Indonesia terhadap AATHP menjadi semakin nyata. Setelah ratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam upaya regional untuk memerangi polusi asap lintas batas, yang menunjukkan

kesediaannya untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam penyelesaian tantangan lingkungan hidup yang mendesak. Evolusi ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia terhadap diplomasi lingkungan hidup di kawasan ASEAN merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prioritas.

4.2. Dinamika Partisipasi Indonesia Semenjak Meratifikasi AATHP

Di dalam dunia diplomasi, kutipan “*actions speak louder than words*” menjadi acuan seberapa besar komitmen suatu negara untuk menjalankan serangkaian kesepakatan dengan negara-negara lain. Ketika melihat kembali pada momentum ratifikasi Indonesia atas AATHP sejak tahun 2014, sudah sepatutnya dalam jangka waktu sembilan tahun ini keterlibatan Indonesia membuahkan hasil yang memuaskan. Sebagai salah satu negara penghasil polusi kabut asap terbanyak di dunia, Indonesia harus terbebani dengan rasa tanggung jawab lebih besar dan mampu memberikan bentuk partisipasi yang nyata. Berdasarkan argumen diplomasi lingkungan, dalam menganalisis partisipasi diplomasi Indonesia terhadap AATHP, tulisan ini akan mencoba untuk membagi pokok pembahasan menjadi dua area utama, yaitu diplomasi pada tingkat birokrat atau teknis (A) dan diplomasi tingkat pemimpin politik (B). Kedua prinsip ini akan mencoba untuk melihat bagaimana peranan Indonesia pada format atau tingkat diplomasi lingkungan yang berbeda. Diplomasi tingkat birokrat akan membedah upaya Indonesia dalam mempromosikan AATHP pada tingkat internasional (di depan layar). Di sisi lain, diplomasi tingkat pemimpin politik lebih berfokus untuk menguraikan strategi Indonesia dalam menuntaskan problematika pada tingkat domestik (belakang layar).

Ketika melihat dari perspektif diplomasi lingkungan pada tingkat birokrat yang lebih berfokus atas peranan negara pada forum internasional, Indonesia telah

mengambil langkah yang terbilang cukup signifikan pada tahun 2023. Sebagai pemegang Keketuaan ASEAN di tahun ini, Indonesia berinisiatif untuk mengangkat isu polusi kabut asap sebagai topik pembahasan utama pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Lingkungan Hidup ke-17. Pada pertemuan ini, Indonesia menekankan seberapa pentingnya peranan ASEAN Coordinating Centre (ACC) dalam memfasilitasi implementasi seluruh aspek AATHP yang harus ditangani dengan lebih cepat dan efektif terhadap polusi kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN. Tindakan Indonesia pada forum internasional ini selaras dengan *general obligations* yang terdapat di dalam Artikel 4 AATHP. Pada bagian ke-2 di dalam Artikel 4 ditegaskan bahwa setiap negara anggota ASEAN harus bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk memantau pencemaran polusi kabut asap. Bagian ke-2 ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem *regional monitoring* dan *mutual assistance* secara internal kawasan ASEAN. Kedua poin ini telah disoroti oleh Indonesia dalam forum pembahasan dan menjadi perhatian khusus bagi semua negara anggota ASEAN.

Tindakan diplomasi nyata lainnya yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan Artikel 4 adalah melakukan kolaborasi teknologi dengan salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Singapura. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan kerja sama dengan ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC) yang berada di bawah naungan National Environment Agency (NSA) milik Singapura untuk menanggapi kekhawatiran mengenai polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di dalam negeri (antara perbatasan Kalimantan dengan Singapura).

Beralih pada perspektif diplomasi tingkat pemimpin politik, untuk menganalisis partisipasi diplomasi Indonesia terhadap AATHP, tulisan ini

harus menyoroti respons yang diberikan oleh pemerintah terhadap isu-isu nasional. Namun, sangat disayangkan kondisi polusi kabut asap di dalam negeri hingga saat ini berbanding terbalik dengan performa diplomasi Indonesia pada forum internasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kasus kebakaran hutan di Indonesia yang telah menyebabkan polusi kabut asap mencapai angka 499 per bulan Agustus 2023. Jumlah kasus kebakaran hutan ini telah merambat dengan lebih cepat jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya (umumnya berada di bawah angka 300). Sikap tidak cepat tanggap pemerintah Indonesia dalam merespon kasus kebakaran hutan yang sudah mulai meningkat sejak akhir tahun 2022 memberikan efek domino terhadap keseharian masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil akumulasi data Kementerian Kesehatan RI, kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 100 ribu kasus setiap bulannya hingga bulan Agustus silam. Kasus ISPA yang meningkat ini juga menghambat produktivitas masyarakat dan mengganggu proses belajar generasi muda di Indonesia.

Untuk menanggapi peningkatan polusi kabut asap ini, Pemerintah Indonesia akhirnya menginisiasi operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di awal bulan Agustus 2023. Operasi TMC ini telah dilakukan pada lokasi yang menjadi pusat terjadinya kebakaran hutan, yaitu di daerah Kalimantan. Akan tetapi, hasil instan tentunya tidak dapat diharapkan melalui penerapan sistem penanggulangan kebakaran hutan ini. Dengan wilayah Indonesia yang luas, ditambah respons pemerintah yang kurang sigap, hasil optimal secara merata masih harus dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

Tulisan ini juga ingin meninjau diplomasi tingkat pemimpin politik Indonesia terhadap AATHP berdasarkan proyek krusial pemerintah Indonesia dalam

periode 2022–2045, yaitu proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejauh ini BMKG menyampaikan bahwa IKN telah memberikan dampak yang cukup buruk atas peningkatan kabut asap dalam ranah domestik. Daerah Kalimantan Timur saat ini bisa dikategorikan sebagai wilayah yang sangat rentan dengan kebakaran hutan. Bersamaan dengan cuaca ekstrem yang diperburuk oleh El Nino, beberapa lokasi titik panas pun bermunculan dan pada akhirnya kebakaran hutan terjadi.

Menanggapi kondisi nasional saat ini, dapat dipahami bahwa upaya diplomasi Indonesia terlalu condong pada tingkat pemimpin politik yang berorientasi pada performa negara secara internasional. Implementasi prinsip-prinsip AATHP yang seharusnya bersifat *inward-looking* justru tidak dioptimalkan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia belum secara menyeluruh menjalankan kewajibannya yang tercantum di dalam Artikel 4. Pada bagian ke-3 dititikberatkan bahwa negara yang telah meratifikasi AATHP harus mengupayakan bentuk tindakan apa pun dalam merespon penyebaran kabut asap. Ketidaksiapan dalam aspek inilah yang menjadi titik lemah partisipasi diplomasi Indonesia dalam meratifikasi AATHP.

Di dalam area diplomasi lingkungan, *theory of compliance* juga menjadi salah satu landasan keberhasilan hubungan diplomasi antarnegara. *Compliance* pada dasarnya menekankan bahwa keberhasilan sebuah perjanjian internasional bergantung pada kepatuhan setiap pihak yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab (*general obligations*) masing-masing. Terutama di dalam ruang lingkup diplomasi lingkungan, di mana untuk mewujudkan pemulihan dalam skala besar, setiap negara memiliki hubungan interdependensi antara satu sama lainnya. Persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti dalam kasus ini kabut asap akan menjadi persoalan regional karena hakikat dari alam yang tidak bisa

dihindari. Setiap target dan isu pemulihan lingkungan yang ingin dituntaskan dalam lingkup kawasan ASEAN membutuhkan kontribusi dan komitmen penuh setiap negara anggotanya. Oleh sebab itu, tingkat antusiasme diplomasi Indonesia di dalam forum-forum internasional harus terlebih dahulu disalurkan pada pemulihan problematika lingkungan (kabut asap) yang sedang meningkat di dalam lingkup domestik.

4.3. Rekomendasi untuk AATHP dan Kontribusi Indonesia ke Depan

Sebagai pengganti ACPTP sekaligus terobosan baru produk diplomasi lingkungan kawasan regional ASEAN, AATHP tentu menemukan sejumlah tantangan sebagaimana yang telah ditinjau lebih dalam bagian sebelumnya. Di sisi lain, fakta bahwa Indonesia hadir sebagai kontributor terbesar terhadap permasalahan polusi kabut asap di kawasan Asia Tenggara juga merupakan bagian dari tantangan yang tak dapat dielakkan. Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan beberapa rekomendasi terkait pengimplementasian AATHP serta untuk kontribusi Indonesia terhadap AATHP ke depan. Dengan mengadopsi beberapa poin pemikiran dari resolusi milik United Nations General Assembly (UNGA) bernama *Institutional Framework for Sustainable Development* yang ditujukan untuk mereformasi UNEP, akan dianalisis secara komprehensif terkait sejumlah rekomendasi untuk AATHP dan kelanjutan kontribusi Indonesia.

Pertama, dalam rangka menjaga efektivitas pengimplementasian AATHP, diperlukan perluasan peran untuk *Non-Governmental Interests* (NGIs). Tak dapat dipungkiri, NGIs telah memainkan peran yang sangat krusial dalam pembuatan perjanjian lingkungan hidup selama dua puluh tahun terakhir (Ali, 2004), menjadikan kontribusi mereka penting untuk ditegakkan dan diakui secara resmi oleh ASEAN dalam memastikan

implementasi AATHP. Melalui keterlibatannya, NGIs akan memperluas jangkauan pandangan yang diungkapkannya melalui analisis bukti ilmiah, teknis, dan hukum yang mereka gunakan untuk menganalisis keseriusan ancaman lingkungan di suatu negara. Dengan begitu, hanya dengan kehadiran mereka dalam perjanjian saja tentu akan menambah legitimasi perjanjian, karena mereka dapat meningkatkan upaya pemantauan kepada badan-badan pemerintah dengan memberikan tekanan kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran. Sejalan dengan ini, perluasan peran NGIs tidak hanya berperan penting bagi pengimplementasian AATHP, tetapi juga berguna untuk kontribusi Indonesia terhadap AATHP ke depannya. Bagi Indonesia, partisipasi NGIs dapat dilakukan dengan pemantauan atas penegakan pemerintah terhadap perjanjian yang tercantum dengan AATHP. Terlebih, NGIs seringkali dinilai membawa agenda publik sehingga keberadaannya dinilai mencakup kepercayaan *grass roots* secara inklusif. Dengan demikian, keterlibatan NGIs akan sangat memengaruhi komitmen dan kontribusi Indonesia terhadap perjanjian AATHP.

Selanjutnya, pengimplementasian AATHP juga sangat memerlukan penegakan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan politik. Dalam hal ini, integritas analisis ilmiah dibutuhkan sebagaimana pengambilan representatif opini ilmiah yang adil untuk membangun kredibilitas dengan tidak mengesampingkan nilai politik dalam penerapannya. Negara-negara ASEAN perlu saling membantu dalam memperkuat lembaga ilmiah yang kolaboratif dikarenakan lembaga tersebut mungkin akan menghasilkan analisis yang dipandang lebih kredibel oleh berbagai negara di dalamnya. Selanjutnya, lembaga tersebut dinilai akan mampu menyajikan penelitian ilmiah secara menyeluruh, dengan menggarisbawahi perbedaan pendapat di

antara para ahli ilmiah. Di sisi lain, tiap-tiap pemangku kepentingan di tiap negara harus berkomitmen terhadap perilaku dan tanggung jawab di masa depan yang hanya akan terpicu jika pencapaian tertentu dicapai. Misalnya, rangkaian perjanjian lintas batas kabut asap berikutnya mungkin memerlukan negara-negara yang berbeda untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan jumlah yang ditentukan, hanya jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa ambang batas yang diukur dalam jumlah yang disepakati telah dilewati. Meskipun mungkin akan menimbulkan kontroversial, namun pendekatan ini dalam batas tertentu akan sangat memengaruhi komitmen dan kontribusi tiap negara dalam menekankan perannya terkait pengimplementasian AATHP tersebut, tak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan kontributor terbesar terhadap permasalahan kabut yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Terakhir, penting untuk mendorong keterlibatan media untuk memainkan peran yang lebih konstruktif. Faktanya, media massa memiliki peran ganda yakni memberitakan peristiwa dan mendidik masyarakat. Dalam hal ini pun media massa pun perlu diberi ruang dan waktu tambahan untuk menyoroti isu terkait lingkungan hidup, baik dalam hal pencegahan peristiwa yang akan datang maupun dalam hal menyoroti negosiasi yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan perlunya kesadaran masyarakat akan betapa krusialnya ancaman lingkungan hidup yang ada saat ini dan betapa pentingnya upaya negosiasi memainkan peran dalam merespon ancaman tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat menentukan perannya untuk menciptakan media massa yang unggul dengan memberi penghargaan untuk jurnalisme yang fokus pada ilmu pengetahuan dan lingkungan sebagai insentif penting yang membangun bagi dunia pemberitaan. Meski begitu, diperlukan kekuatan jurnalis yang dapat mempertajam argumentasi dan memastikan adanya transparansi data dan jalur lobi yang

dilaporkan ke semua pihak. Sehingga, upaya memajukan keterlibatan media yang tajam dan transparan dalam menyoroti isu lingkungan hidup ini merupakan hal yang tidak dapat disepelekan.

5. Kesimpulan

Menilik kembali performa diplomasi lingkungan Indonesia bahwa meskipun menjadi negara terakhir dalam meratifikasi AATHP, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan berpartisipasi aktif dalam upaya domestik dan regional untuk memerangi polusi kabut asap lintas batas. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap diplomasi lingkungan hidup di kawasan ASEAN merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prioritas. Sebagai kesimpulan, berikut sejumlah partisipasi Indonesia sejak meratifikasi AATHP yang menjadi bukti komitmennya terhadap diplomasi lingkungan hidup.

Dalam diplomasi tingkat birokrat, pertama, Indonesia mengangkat isu *haze pollution* sebagai topik pembahasan utama pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Lingkungan Hidup ke-17. Kedua, Indonesia melakukan kolaborasi teknologi dengan salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Singapura. BMKG melakukan kerja sama dengan ASMC yang berada di bawah naungan NSA milik Singapura untuk merespons kekhawatiran mengenai polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan Kalimantan yang berbatasan dengan Singapura. Kedua tindakan tersebut selaras dengan *general obligations* yang terdapat dalam Artikel 4 AATHP yang menggarisbawahi bahwa setiap negara anggota ASEAN harus bekerja sama dalam menerapkan langkah-langkah efektif untuk memantau *haze pollution*.

Berikutnya, dalam diplomasi tingkat pemimpin politik, pemerintah Indonesia menginisiasi operasi TMC di lokasi yang menjadi pusat terjadinya kebakaran hutan, yaitu di Kalimantan pada

Agustus 2023. Walau begitu, hasil instan tidak dapat diharapkan melalui penerapan sistem ini. Ditambah, proyek krusial Pemerintah Indonesia dalam periode 2022–2045, yaitu IKN telah memberikan dampak yang cukup buruk atas peningkatan *haze pollution* dalam ranah domestik berdasarkan tinjauan BMKG. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya diplomasi Indonesia terlalu condong pada tingkat pemimpin politik yang berorientasi pada performa negara secara internasional, dimana implementasi prinsip-prinsip AATHP yang seharusnya bersifat *inward-looking* justru tidak dioptimalkan oleh Indonesia. Oleh sebab itu, tingkat antusiasme diplomasi Indonesia di dalam forum-forum internasional harus terlebih dahulu disalurkan pada pemulihan problematika lingkungan (*haze pollution*) yang sedang meningkat di dalam lingkup domestik.

Selanjutnya, rekomendasi terkait AATHP dan kontribusi Indonesia ke depannya terbagi menjadi tiga sorotan, pertama, diperlukan perluasan peran NGIs

untuk menambah legitimasi perjanjian AATHP melalui pemantauan mereka terhadap badan-badan pemerintahan. Kedua, diperlukan penegakan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan politik. Integritas ilmiah dibutuhkan untuk membangun kredibilitas tanpa mengesampingkan nilai politik dalam penerapannya. Terakhir, penting untuk mendorong keterlibatan media untuk memainkan peran yang lebih konstruktif. Mengingat media berperan untuk memberitakan peristiwa dan mendidik masyarakat dengan menyoroti isu terkait lingkungan hidup, baik dalam menyoroti pencegahan peristiwa maupun negosiasi yang sedang berlangsung. Dengan terus memahami peran kritis Indonesia dalam diplomasi lingkungan melalui perjanjian kerja sama regional AATHP, Indonesia beserta negara-negara ASEAN diharapkan dapat mencegah dan mengurangi permasalahan polusi asap lintas negara di kawasan Asia Tenggara secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Elyzabeth Bonethe Nasution, S.I.P., M.A, sebagai dosen mata kuliah Diplomasi di Universitas Pelita Harapan atas bimbingan dan dukungannya yang sangat berharga selama penyelesaian proyek ini. Keahlian dan wawasan beliau sangat berperan dalam membentuk arah pekerjaan ini. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan individu yang telah menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk proyek ini. Tanpa kerja sama dan masukan mereka, upaya ini tidak akan mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. H. (2004). Conflict resolution and consensus building: applications to the small- scale mining sector. Paper presented at the CASM AGM, Colombo, Sri Lanka, October.
- Ali, S. H. & Vladich, H. V. (2016). Environmental Diplomacy. In C. M. Constantinou, P. Kerr & P. Sharp (Eds.), *The SAGE Handbook of Diplomacy* (pp. 601–614). London, England: SAGE Publications Ltd.
- ASEAN. (2021). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Kuala Lumpur, Malaysia: ASEAN. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEANAgreementonTransboundaryHazePollution-1.pdf>.
- ASEAN. (2023). 17th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 18th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *ASEAN Media Release*. <https://asean.org/media-release-of-17th-asean-ministerial-meeting-on-the-environment-and-18th-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>.
- Benedick, R. E. (1999). Diplomacy for the Environment. *Environmental Diplomacy*, 3–12. American Institute for Contemporary German Studies. <https://aicgs.org/wp-content/uploads/2011/11/environmentaldiplomacy.pdf>.
- Bhwana, P.G. (2023). Haze Pollution Concerns, Ministry Says Indonesian Govt Uses Open Data in Addressing It. *Tempo*. <https://en.tempo.co/read/1781239/haze-pollution-concerns-ministry-says-indonesian-govt-uses-open-data-in-addressing-it>.
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–35. <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Febriyani, N. (2019). Analisis Kebijakan Indonesia Terkait Penundaan dalam Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2014. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 2(2), 73–84.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2018, January 18). *Perkembangan Mutakhir Industri Minyak Sawit Indonesia*. *Gapki.Id News*. <https://gapki.id/news/2018/01/17/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia/>.
- Hasan, M.I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Kingsbury, B. (1998). The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of International Law. *Michigan Journal of International Law*, 19(2).

- Narain, S. (1999). Environmental Diplomacy in an Unequal World. *Environmental Diplomacy*, 17–25. American Institute for Contemporary German Studies.
<https://aicgs.org/wp-content/uploads/2011/11/environmentaldiplomacy.pdf>.
- Raustiala, K. (2000). Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 32(3).
- Robertua, V., & Sigalingging, L. (2019). Indonesia Environmental Diplomacy Reformed: Case Studies of Greening ASEAN Way and Peat Restoration Agency. *Andalas Journal of International Studies*, 8(1).
- Siddiqui, M. R., & Quah, E. (2004). Transboundary haze pollution in Southeast Asia: Sustainable development and cooperative policy approaches. *Environmental Development and Sustainability*, 6(3), 20.
- Suryani, A. S. (2012). Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal DPR RI*, 03(01).
- Young, O. R. (1999). *The Effectiveness of International Environmental Regimes: Casual Connections and Behavioral Mechanisms*. MIT Press.

MEMPROMOSIKAN ENERGI TERBARUKAN: DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERUBAHAN IKLIM

Elyzabeth Bonethe Nasution¹⁾, Dylan Andre Rolliansyah²⁾, Hanna Angel Roring³⁾, Meyer Rafael Rino⁴⁾, Rara Nindya Wijayantika Lanjari^{5)*}

¹⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

³⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

⁴⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

⁵⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: elyzabeth.nasution@uph.edu¹⁾, 01043210054@student.uph.edu²⁾, 01043210076@student.uph.edu³⁾, 01043210081@student.uph.edu⁴⁾, 01043210053@student.uph.edu^{5)*}

ABSTRACT

Providing sustainable energy has become a global priority in the face of increasingly alarming climate change. Renewable energy is a key solution to minimize environmental impact, reduce greenhouse gas emissions, and decrease reliance on fossil fuels that accelerate climate change. Indonesia, with its significant potential for renewable energy, has adopted strategies and policies supporting the development of renewable energy, emphasizing the role of environmental diplomacy in achieving these goals. Indonesia's position in regional and global geopolitics also influences the applied renewable energy policies. This study employs qualitative research methods and secondary data collection to gather information from literature sources, government reports, scientific journals, and news articles. This method allows researchers to analyze historical data, policies, and practices related to renewable energy in Indonesia, providing a comprehensive overview of Indonesia's diplomatic strategies for adopting and promoting renewable energy. The research will be analyzed from a neoliberal institutionalism perspective, emphasizing the importance of international institutions in achieving goals. Indonesia seeks international partnerships to develop and invest in renewable energy projects. This reflects a neoliberal institutionalist approach to energy sector development, with an emphasis on cooperation among states, technology transfer, and access to global financial resources. Through the neoliberal institutionalism framework, Indonesia's environmental diplomacy strategy in renewable energy development reflects the government's efforts to achieve balanced economic, environmental, and foreign policy goals. This research aims to delve into Indonesia's environmental diplomacy contributions to successfully implementing and promoting its renewable energy policies, anchored on neoliberal principles in addressing climate change.

Keywords: Renewable Energy, Environmental Diplomacy, Climate Change, Indonesia, Neoliberalism Institutionalism

1. Pendahuluan

Aktivitas manusia yang terus mengeksploitasi alam membuat keadaan alam semakin buruk dan menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang suhu bumi dan pola cuaca. Awalnya perubahan ini terjadi alami karena faktor alam, namun mulai tahun 1800-an penyebab utama perubahan iklim adalah aktivitas manusia (terutama sejak revolusi industri). Sejak catatan sepanjang periode praindustri (1800-1900), sekarang terjadi peningkatan suhu sebesar 1,15 derajat Celcius lebih tinggi

(Badan Meteorologi Dunia, 2023). Di Indonesia sudah mencapai rata-rata suhu 27 derajat Celcius, bahkan maksimum mencapai 38 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan adanya anomali suhu sebesar 0,4 derajat Celcius karena seharusnya rata-rata suhu di Indonesia kurang lebih 26,6 derajat Celcius. Selain itu BMKG mencatat suhu di kawasan Jabodetabek berkisar pada 35-37,5 derajat Celcius (BMKG, 2023). Peristiwa ini juga didukung dari kejadian anomali iklim El Nino yang membuat minimnya pembentukan awan hujan di Indonesia. Selain itu perubahan iklim ini terjadi juga atas dampak

besar dari pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga menaikkan suhu bumi melalui panas matahari yang menembus lapisan ozon. Faktor lain adalah karena deforestasi, polusi berlebih, konsumsi berlebih, dsb.

Perubahan iklim tersebut sangat mengganggu aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menghasilkan banyak sekali dampak negatif mulai dari hal kecil sampai hal besar. Dampak yang terjadi merupakan *domino effect* yang ketika satu dampak dapat menyebabkan dampak lain yang kerugiannya lebih besar. Dengan demikian tidak hanya alam yang terkena dampaknya, namun juga manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu permasalahan ini harus segera ditangani.

Permasalahan tentang perubahan ini tidak bisa hanya dihadapi oleh satu negara saja, karena ini adalah permasalahan global yang menjadi tanggung jawab bersama. Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) sekaligus sangat rentan dengan bencana alam, harus mementingkan keberlangsungan lingkungan hidup karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kesehatan hidup masyarakat. Permasalahan ini melibatkan aktor di luar negara yang juga berpengaruh atas terjadinya hal-hal ini, misalnya seperti keberlangsungan industri/perusahaan asing yang berdampak pada pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Dengan demikian perlu adanya diplomasi lingkungan untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah global ini. Menanggapi isu ini, Indonesia berkomitmen dalam melakukan diplomasi lingkungan, tidak hanya untuk kepentingan negara, namun juga ikut berkontribusi aktif dalam agenda pembangunan berkelanjutan 2030 atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini dilakukan dengan cara memastikan pembahasan tentang perubahan iklim masuk sebagai agenda utama ketika Indonesia mengetuai presidensi Group of 20 (G20) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Indonesia juga berupaya

untuk memenuhi target pada Paris Agreement. Selain itu Indonesia juga berpartisipasi dalam agenda United Nations Environment Programme (UNEP) dan mendukung *non-governmental organization* (NGO) seperti WWF, Greenpeace, dan Walhi untuk memberantas isu lingkungan hidup, di tengah upaya lainnya.

Tidak hanya melalui diplomasi lingkungan, negara juga mengupayakan untuk menggunakan energi terbarukan (*renewable energy*) sebagai langkah yang signifikan dalam kepentingan negara maupun tujuan global. Energi ini sebagai bentuk untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang menjadi salah satu penyebab utama dalam perubahan iklim. Di Indonesia sendiri sudah ada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mengacu pada Perpres No. 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Kementerian ESDM, 2014). Sebagai contoh hal ini diimplementasikan dalam kebijakannya ataupun langkah dalam mempromosikan energi terbarukan melalui Indonesia Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP). Dengan demikian mempromosikan energi terbarukan penting untuk membantu mengurangi perubahan iklim.

Dengan demikian, tulisan ini mencoba melihat dua hal, yaitu strategi dan kebijakan Indonesia mengenai energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim, serta upaya Indonesia untuk dapat mengencarkan implementasi strategi energi terbarukan melalui diplomasi lingkungan.

2. Tinjauan Pustaka

Melalui tinjauan pustaka ini, peneliti berharap mengetahui bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya menyimpulkan mengenai kondisi energi terbarukan di Indonesia dan korelasinya dengan upaya diplomatik Indonesia. Mengetahui kedua ini akan memberi gambaran mengenai bagaimana status dari energi terbarukan dan kaitannya dengan upaya diplomasi masa

lampau dan membantu dalam mengembangkan analisis peneliti.

Meninjau studi-studi terdahulu mengenai energi terbarukan di Indonesia, beberapa kesimpulan mendasar mengenai status dan kondisi energi terbarukan dapat ditetapkan. Udin (2020) dalam tulisannya yang bertajuk *Renewable energy and human resource development: challenges and opportunities in Indonesia* menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam penggunaan energi terbarukan, yang dilihat dari segi sumber daya alam yang berlimpah sehingga jenis-jenis sumber energi terbarukan yang dapat digunakan cukup banyak. Di antaranya adalah energi air, energi geotermal, energi bio, energi solar dan energi angin. Oleh karena ini, Indonesia harus melanjutkan upayanya dalam mengembangkan infrastruktur energi terbarukan agar negara dapat beralih dari penggunaan sumber energi tidak terbarukan (batu bara, minyak bumi, dan seterusnya) ke energi terbarukan (Udin, 2020, 235-236).

Kesimpulan sebelumnya didukung oleh penelitian lain oleh Pambudi, dkk (2023) berjudul *Renewable Energy in Indonesia: Current Status, Potential, and Future Development* yang menyatakan bahwa meski sumber energi terbarukan Indonesia berlimpah, dibutuhkan upaya lebih keras dari negara untuk membangun infrastruktur pendukung energi terbarukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Infrastruktur ditegaskan karena tanpa infrastruktur memadai penggunaan energi terbarukan untuk sebagai sumber energi utama sulit direalisasikan. Di saat bersamaan, artikel ini melihat bahwa Indonesia juga masih harus menghadapi tantangan berupa menyediakan pekerja dan operator berkualitas dalam jumlah banyak agar energi terbarukan dapat digunakan. Dengan demikian energi terbarukan dapat digunakan secara ekstensif di Indonesia (Pambudi & et al, 2023, 24-26).

Terkait bagaimana diplomasi lingkungan Indonesia berkorelasi dengan promosi energi terbarukan, kesimpulan yang

dihasilkan oleh studi lain beragam. Rudiandy (2020) dalam tulisannya *Pentingnya Diplomasi Energi dalam Upaya Mencapai Ketahanan Energi Nasional* menegaskan bahwa Indonesia, pada satu sisi, digambarkan sudah mengupayakan transisi ke energi terbarukan dan berupaya untuk mengikuti kesepakatan Paris Agreement, namun menemui beberapa tantangan yang menghambat perkembangannya. Terhadap ini disimpulkan bahwa Indonesia harus segera mengedepankan orientasi *outward looking* dalam mengembangkan kebijakan energi (Rudiany, 2020, 8-9). Dengan kata lain Indonesia direkomendasikan untuk secara aktif melakukan *outreach* dan berinteraksi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kapasitas energinya terutama energi terbarukan.

Meskipun terdapat kesimpulan sebelumnya, studi lain oleh Robertua dan Sihura (2020) yang berjudul *The Rise and the Fall of Indonesia's Climate Diplomacy: Case Study of the Joint Crediting Mechanism in Indonesia* menemukan bahwa Indonesia hingga saat ini masih belum konsisten mendukung pengembangan energi terbarukan dikarenakan tidak mengoordinasi kerja sama dengan organisasi sipil maupun menyediakan insentif finansial, yang dibuktikan dengan tidak serius mendukung Joint Crediting Mechanism (JCM) (Robertua & Sihura, 2020, 51). Ini menyebabkan adanya kesenjangan antara retorika yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan tindakan konkret yang menjadi ekspektasi bersama.

Berdasarkan literatur yang ditemukan, Indonesia tampak sudah berupaya untuk mengedepankan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Dikarenakan kondisi Indonesia yang lebih mengandalkan sumber energi fosil seperti batu bara dan sumber-sumber yang tidak ramah lingkungan, ancaman terhadap pasokan energi dan lingkungan energi Indonesia menjadi lebih nyata. Oleh sebab itu, bahwa ada upaya untuk membuat perubahan adalah arah langkah yang benar.

Namun patut dicatat bahwa dalam rangka mengimplementasi energi terbarukan di Indonesia, negara menghadapi berbagai tantangan dalam merealisasikan rencana ini. Tantangan lebih banyak bersifat internal dengan masalah infrastruktur yang belum mumpuni dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Adanya kedua tantangan internal ini menghambat penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi utama di Indonesia terlepas dari sumber daya alam yang berlimpah.

Selain itu dari segi kaitan energi terbarukan dengan diplomasi Indonesia, ditemukan bahwa Indonesia harus membulatkan tekad dan komitmennya dalam merealisasikan energi terbarukan apabila upaya diplomasinya akan berhasil. Dikarenakan kurangnya keseriusan dalam bidang ini, upaya diplomasi Indonesia belum mencapai potensi maksimumnya.

Teori Neoliberalisme Institusional memandang bahwa dalam sistem internasional yang diasumsikan penuh dengan anarki, kerja sama antarnegara dan dengan aktor-aktor nonnegara difasilitasi dengan keberadaan organisasi internasional. Melalui organisasi dan forum internasional, negara dan aktor nonnegara dapat menjalin relasi dan mengupayakan kerja sama yang adil dan berdampak secara kolektif. Mengaitkan teori ini dengan topik penelitian ini, maka penelitian ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana Indonesia menggunakan diplomasi lingkungan dan energi terbarukan dalam rangka menanggapi perubahan iklim. Ini dilakukan dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan di panggung internasional baik itu di tingkat bilateral maupun multilateral. Hasilnya adalah tampaknya kontribusi Indonesia dalam mengatasi masalah perubahan iklim yang melanda dunia.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif yang mempertimbangkan teori-teori dasar yang telah ditetapkan dan mengaitkan

relevansinya dengan fenomena-fenomena dan hubungan-hubungan tiap aktor yang telah diangkat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek fenomena ini melalui sudut pandang yang lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder sebagai metode analisis data bersifat deskriptif.

Pengumpulan data sekunder melibatkan analisis literatur di mana peneliti akan meninjau laporan pemerintah, kebijakan energi terkini, artikel ilmiah, sumber-sumber berita, serta dokumen-dokumen terkait usaha diplomatik Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya, pendekatan kualitatif melibatkan analisis dokumen yang cermat. Dalam analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi tren, perubahan kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi diplomasi lingkungan Indonesia dalam konteks perubahan iklim. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang upaya Indonesia dalam mempromosikan energi terbarukan dalam strategi diplomasi lingkungan serta dampaknya terhadap perubahan iklim global. Pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Indonesia mempromosikan energi terbarukan dalam diplomasi lingkungan serta dampak dari kebijakan energi terbarukan Indonesia terhadap perubahan iklim global, dapat diungkapkan melalui analisis kualitatif ini.

Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif agar dapat menggambarkan bagaimana strategi energi terbarukan diinisiasi dan dukungan dari berbagai kebijakan serta perundang-undangan Indonesia terhadap upaya mempromosikan energi terbarukan untuk berkontribusi dalam memitigasi perubahan iklim global. Dengan pendekatan ini, penelitian akan memberikan wawasan yang mendalam tentang peran Indonesia dalam memerangi perubahan iklim melalui diplomasi lingkungan dan promosi energi terbarukan. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual

tentang upaya-upaya Indonesia dalam mencapai tujuan lingkungan global, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan tantangan global yang semakin mendesak seperti perubahan iklim.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Strategi dan Kebijakan Indonesia Mengenai Energi Terbarukan

4.1.1. Strategi Energi Terbarukan

Dalam rangka mengatasi perubahan iklim, Indonesia saat ini sedang mengupayakan implementasi transisi ke energi terbarukan menggunakan sumber daya alam berlimpah yang dimiliki. Namun dengan situasi domestik berupa ketergantungan tinggi terhadap sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan, dapat dilihat bahwa upaya implementasi tersebut akan sulit dan membutuhkan strategi yang mempertimbangkan banyak aspek. Tanpa strategi yang tepat, implementasi energi terbarukan akan terhambat dan diplomasi lingkungan Indonesia yang mengandalkan energi terbarukan akan mengalami tantangan. Apabila ini terjadi, maka mustahil bagi Indonesia untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal (negara lain, organisasi internasional, forum internasional, dan seterusnya) sebab tampilan bahwa Indonesia tidak dapat berkontribusi secara nyata terhadap ancaman bersama.

Mengingat ini, penting bagi Indonesia untuk memiliki strategi energi terbarukan konkret agar Indonesia dapat meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan menguatkan kerja sama dengan pihak eksternal sesuai dengan paham Neoliberalisme Institusional. Strategi-strategi yang dimiliki Indonesia saat ini ada tiga yaitu 1) peningkatan investasi, 2) pengembangan infrastruktur, dan 3) peningkatan kualitas tenaga kerja. Masing-masing strategi ini akan dijelaskan secara rinci.

Strategi peningkatan investasi merupakan strategi Indonesia untuk meningkatkan jumlah investasi terhadap isu

energi terbarukan. Mengantisipasi harga implementasi energi terbarukan yang tinggi, Indonesia membutuhkan dana masif apabila ingin melanjutkan upaya realisasi energi terbarukan. Kebutuhan ini didukung oleh rekomendasi yang diusulkan suatu kajian yang berfokus pada pengembangan investasi energi alternatif yang menyimpulkan bahwa meningkatkan investasi energi alternatif dapat dilakukan dengan pemberian insentif dan kemudahan birokrasi oleh pemerintah (Adjikri, 2017, 11-12). Terkait apakah strategi tersebut sejauh ini berhasil dapat diperdebatkan dikarenakan penemuan studi-studi lain yang menyimpulkan bahwa saat ini iklim investasi untuk energi terbarukan masih belum sepenuhnya kondusif untuk peningkatan investasi baik dari dalam maupun dari luar dikarenakan kebijakan internal yang kurang efisien (Mutia & Nurjanah, 2019, 37-38). Namun fakta bahwa negara sudah mengupayakan implementasi iklim investasi yang lebih ramah menunjukkan bahwa negara sudah melangkah ke arah yang benar. Yang dibutuhkan adalah untuk mengkaji kembali kebijakan investasi dan memberlakukan insentif-insentif yang dapat menarik perhatian investor terhadap sektor energi terbarukan.

Strategi berikutnya adalah pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Dikarenakan sifat energi terbarukan yang kompleks dan membutuhkan prasyarat dan kemampuan teknis, wajar bahwa terdapat penekanan pada pembangunan infrastruktur dan pelatihan pekerja. Menurut artikel dari Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Indonesia saat ini berupaya untuk menciptakan pasar untuk energi terbarukan dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga energi terbarukan seperti energi panas bumi (Kementerian ESDM, 2023). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual energi terbarukan kepada pembeli dan meningkatkan kualitas fasilitas. Dengan demikian, implementasi energi terbarukan di Indonesia diharapkan dapat dilakukan.

Selain infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan bagi tenaga kerja juga termasuk bagian yang ditekankan oleh Indonesia dalam strategi implementasi energi terbarukan. Hal ini dikarenakan menangani dan menjalankan mesin dan peralatan yang menghasilkan energi terbarukan tidak dapat dilakukan tanpa pelatihan khusus sehingga terdapat kepentingan untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas.

Terhadap ini ditemukan bahwa pengembangan tenaga kerja berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan didorong oleh Indonesia melalui tindakan seperti pengadaan pelatihan energi terbarukan dan penciptaan program D4 konsentrasi energi terbarukan. Hal ini timbul akibat kerja sama antara Kemendikbud Ristek dengan Kementerian ESDM dan perusahaan swasta yang berfokus pada inovasi dalam energi terbarukan (Kemendikbud, 2022). Langkah ini, beserta langkah-langkah lain yang dilakukan negara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya, menunjukkan bahwa Indonesia menjadikan strategi ini sebagai bagian dari upayanya dalam mengimplementasi energi terbarukan.

Pada dasarnya terdapat beberapa strategi implementasi energi terbarukan yang diambil Indonesia seperti peningkatan investasi, strategi pengembangan infrastruktur serta strategi peningkatan kualitas tenaga kerja. Implementasi dari energi terbarukan tidak dapat dilakukan di Indonesia apabila prasyaratnya tidak tersedia. Ini mencakup infrastruktur, investasi, dan tenaga kerja, dan ketiga ini sangat penting dalam mengimplementasi energi terbarukan. Oleh karena ini, Indonesia harus melanjutkan strategi-strategi tersebut dan meningkatkan kualitas dari prasyarat-prasyarat tersebut. Tanpa langkah ini, maka energi terbarukan mungkin dapat diimplementasikan tetapi tidak secara efisien dan tidak dapat menggantikan energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Menimbang hal ini, langkah berikut Indonesia harus bersifat memaksimalkan dan memajukan strategi yang sudah ada melalui kebijakan konkret.

4.1.2. Kebijakan dan Program Energi Terbarukan di Indonesia

Dalam upaya untuk menyukseskan strategi energi terbarukan, pemerintah Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan (Firdaus, 2022, 424-427). Dari segi hukum, sudah terdapat Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi yang berisikan regulasi terkait Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia. Secara khusus UU ini mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pasokan energi terbarukan sesuai kewenangan masing-masing daerah. Kemudian terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diformulasikan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dan diresmikan oleh DPR RI. Kebijakan ini yang selanjutnya akan menjadi panduan utama dalam pengelolaan energi nasional. Target dari KEN ialah mencapai penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) setidaknya hingga 23% dari keseluruhan energi utama di tahun 2025 serta mencapai penggunaan EBT hingga 31% di tahun 2050 (OECD, 2021, 6). Menurut data hingga akhir tahun 2022, DEN mencatat bahwa andil EBT dalam bauran energi nasional mencapai 12,3% (Anwar & Triatmojo, 2020). Dalam UU Energi juga tercantum mengenai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) hingga tahun 2050 untuk mendukung strategi dan implementasi KEN. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017, RUEN berisikan kebijakan terkait energi terbarukan yang menyatakan rumusan pelaksanaan KEN akan bersifat lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan berkelanjutan negara (Renewable Energy Indonesia, 2023).

Untuk mendukung pencapaian target EBT di masa depan, terdapat berbagai program terkini yang diinisiasi pemerintah. Pertama, untuk melancarkan program Energy Transition Mechanism (ETM), pada KTT

G20 di Bali November 2022 silam, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, secara resmi mengumumkan peluncuran ETM Country Platform (ETMCP) yang merupakan suatu upaya koordinasi kunci yang bertujuan mendorong transisi energi yang berkeadilan dan terjangkau di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2022). ETMCP ini akan memegang peran utama dalam mengkoordinasikan berbagai aspek transisi energi, menyediakan dukungan finansial bila diperlukan, serta mendukung proses transisi yang berkeadilan di tingkat regional dan nasional. Dalam pengimplementasiannya, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai Manajer ETMCP. Dalam menyukseskan program ini, PT SMI bertugas dalam mengembangkan kerangka investasi serta pembiayaan yang diperlukan dalam pengoperasian ETMCP. Terdapat berbagai institusi yang bergabung sebagai mitra dalam program ini, seperti World Bank, Climate Policy Initiative (CPI), United Nations Development Programme (UNDP), Global Green Growth Institute (GGGI), dan masih banyak lagi. Kolaborasi ini mendorong PT SMI untuk memperluas aksesnya terhadap solusi pembiayaan untuk ETMCP, termasuk memberikan bantuan teknis dalam merancang mekanisme keuangan, memperbaiki fasilitas pembiayaan iklim, serta memberikan dukungan kepada PT SMI untuk mengakses sumber pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) (Indonesia Green Growth Program, 2023).

Kedua, di sektor bioenergi, terdapat peresmian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 35203 pada Maret 2023 yang mana ini merupakan langkah yang diambil Indonesia sebagai komitmen nyata dalam melancarkan strategi RUEN yang menargetkan kontribusi biogas sebesar 489,8 juta m³ dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Sesuai dengan data yang dihimpun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per tahun 2022, tercatat Indonesia sudah mencapai

47,72 juta m³ biogas yang telah diimplementasikan melalui 52.113 fasilitas biogas di berbagai sektor, yang sebagian besar dihasilkan pada skala rumah tangga dan komunal. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan capaian produksi biogas dalam skala industri juga karena biogas memiliki potensi untuk menggantikan penggunaan gas bumi dan elpiji. Dengan demikian regulasi ini memberikan kerangka hukum dan teknis yang jelas bagi bisnis biometana serta turut berkontribusi pada ketahanan energi, pengurangan impor energi, serta lingkungan yang lebih baik (Indonesia Green Growth Program, 2023).

Ketiga, Kementerian ESDM tercatat akan mengalirkan dana sebesar Rp 483,11 miliar yang dipergunakan untuk menyukseskan pembangunan proyek infrastruktur Barang Milik Negara (BMN) dalam sektor EBT di Indonesia pada Juli 2022 silam (Setiawan, 2022). Kepala Pusat Pengelolaan Aset Negara di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyatakan bahwa dana itu nantinya akan dipergunakan untuk membangun kurang lebih sebanyak 33.476 unit pembangkit energi terbarukan. Program infrastruktur EBT ini mencakup tiga jenis sumber energi, yaitu dari sektor energi surya yang terdiri dari Penerangan Jalan Umum (PJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat, PLTS *Rooftop*, dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Selanjutnya, pembangunan infrastruktur BMN dari energi air yakni Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) serta dari sektor bioenergi yang mencakup Palm Oil Mill Effluent (POME) serta Biogas Komunal (Setiawan, 2022). Tentu masih banyak lagi kebijakan, program, dan kemitraan lainnya yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung kebijakan energi terbarukan. Namun perlu dicatat bahwa semua ini masih dalam proses dan membutuhkan waktu agar terwujud.

4.2. Diplomasi Lingkungan Indonesia di Kancah Internasional

4.2.1. Diplomasi Lingkungan Indonesia di Tingkat Internasional

Upaya-upaya diplomasi tentunya diperlukan dalam mempercepat perkembangan energi terbarukan melalui kerja sama internasional. Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi lingkungan untuk menjalin kerja sama dengan forum regional sampai dengan forum internasional. Dalam hal ini Indonesia mengajak seluruh negara yang hadir pada G20 dan ASEAN untuk ikut menangani permasalahan perubahan iklim yang semakin parah dan memberikan komitmen Indonesia dalam transisi energi global. Dalam agenda G20, Indonesia memiliki topik-topik utama yang menjadi pembahasan terkait energi terbarukan, seperti Energy Transitions Working Group (ETWG) yang berfokus pada pembahasan pendanaan, teknologi, dan akses. Dengan berkonsentrasi pada ketiga bidang ini, G20 diperkirakan akan mampu mencapai konsensus dalam mempercepat laju peralihan energi global sekaligus memperkuat sistem energi global yang adil dan berkelanjutan (Kementerian ESDM RI, 2022).

Rencana aksi G20 akan memberikan penekanan kuat pada mobilisasi pendanaan untuk transisi energi selain memberikan prioritas pertama pada aksesibilitas dan teknologi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai perlunya pendanaan untuk mempercepat transisi energi, dan G20 merupakan platform penting untuk mewujudkan kebutuhan ini. Transformasi energi tidak dapat berjalan sesuai rencana jika sumber pendanaan tidak didukung sepenuhnya oleh semua pihak (Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM, 2022).

Kemudian, Indonesia mencetuskan kebijakan Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam mempromosikan energi terbarukan melalui forum G20 dan ASEAN. ETM merupakan terobosan baru

Indonesia dalam pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE). ETM dicetuskan karena Indonesia digadang-gadang akan menjadi negara maju pada tahun 2045 yang membutuhkan energi banyak namun tidak berdampak buruk terhadap lingkungan (Informasi Publik Fiskalpedia Energy Transition Mechanism, 2022). Langkah utama ETM adalah untuk menghentikan penggunaan batu bara dan segera melakukan transisi ke energi terbarukan. Indonesia bekerja sama dengan 14 organisasi internasional dan asing menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mempercepat transisi energi. Kolaborasi ini mengakui Indonesia sebagai negara berkembang yang menghasilkan energi bersih dan terbarukan. Kebijakan transisi energi ini diproyeksikan dapat mengurangi emisi karbon sekitar 50 juta ton pada tahun 2030, atau 160 juta ton pada tahun 2040 (Indonesia Percepat Transisi Energi Melalui Kerja Sama Multilateral, n.d.).

Kemudian terdapat kebijakan Just Energy Transition Partnership (JETP). Investasi publik dan swasta digabungkan dalam model ini untuk membantu negara-negara berkembang membiayai perubahan iklim, terutama ketika beralih dari pembangkitan energi dari bahan bakar fosil (Koty, 2023). Dalam rangkaian acara KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu, Presiden Joko Widodo, Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat (AS), dan para pemimpin negara-negara International Partners Group (IPG) meluncurkan perjanjian internasional yaitu Perjanjian Adil yang berfokus pada skema pendanaan transisi energi JETP. Beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris, IPG dipimpin oleh AS dan Jepang. Pernyataan bersama yang tidak mengikat menandai kehadiran perjanjian internasional ini (Humas EBTKE, 2023).

Sebagai forum multilateral atau antarpemerintah dalam melakukan kerja sama, G20 dan ASEAN mencerminkan

perspektif Neoliberalisme Institusional dalam melakukan perjanjian kerja sama dalam bidang tertentu. Gagasan inti Neoliberalisme Institusional, yaitu saling ketergantungan dan hal tersebut telah hadir dalam forum kerja sama G20 dan ASEAN hingga saat ini. Keberadaan forum G20 dan ASEAN telah mempererat hubungan antarnegara anggotanya karena mempertemukan mereka untuk membahas berbagai topik dari berbagai bidang kehidupan serta rumitnya domain atau saluran interaksi antaraktor dalam Hubungan Internasional. G20 dan ASEAN juga memberikan kesempatan bagi negara anggota yang memiliki status negara berkembang untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kapabilitas ekonomi melalui pengembangan energi terbarukan.

4.2.2. Tantangan dan Hambatan Indonesia dalam Mempromosikan Energi Terbarukan

Dengan target penggunaan EBT sebesar 23% dari total produksi energi di tahun 2023, keadaan saat ini masih sulit bagi Indonesia untuk mencapainya. Terlebih dalam Indonesia mengupayakan penggunaan energi terbarukan untuk dipromosikan, masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk menyelaraskan dengan keadaan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan Indonesia saat ini yang masih dengan energi fosil. Ketergantungan ini dalam tahun 2020 tercatat dengan rincian batu bara sebesar 35,36%, minyak bumi 34,38 %, dan gas bumi 19,36%. Di sisi lain, untuk penggunaan energi terbarukan masih sebesar 10,9% (Kementerian ESDM, 2020). Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia mencapai 12.736,7 megawatt (MW) untuk pemanfaatan penggunaan energi terbarukan di Indonesia sampai semester I-2023. Dari data ini terlihat bahwa ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi walaupun sudah ada peningkatan untuk penggunaan energi terbarukan. Ketergantungan ini dikarenakan harga energi fosil yang murah,

sehingga dengan perekonomian Indonesia yang masih terus berkembang, sulit untuk langsung mengubah kebijakan tersebut karena masih banyak masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Kementerian ESDM menyatakan adanya kesulitan yang berasal dari faktor perekonomian juga terlihat dari keperluan akan investasi yang besar senilai 36,95% miliar dolar AS (SolarKita, 2023). Harapan tentang datangnya investasi masih belum sesuai target, disebabkan oleh minat terhadap investasi terbarukan di Indonesia yang masih kurang. Faktor ini juga disebabkan oleh birokrasi yang kompleks serta ketidakpastian dalam kebijakan investasi. Oleh karena itu dalam pandangan memberikan insentif kepada pasar untuk investasi dan pengembangan menurut Neoliberal Institusional, Indonesia masih belum cukup matang karena masih banyak hal yang menghalangi investasi.

Kendala dari dalam negeri tentunya menjadi hambatan untuk Indonesia dapat berpartisipasi aktif dan besar dalam diplomasi lingkungan, khususnya energi terbarukan. Dengan keadaan nasional yang demikian, Indonesia menempati peringkat 71 dari 115 negara dunia untuk indeks transisi energi dengan mencapai 51 poin, serta dalam kawasan ASEAN Indonesia berada di peringkat enam dari negara ASEAN (World Economic Forum, 2021). Posisi ini membuat Indonesia berusaha keras untuk memenuhi standar yang diberikan internasional. Terlebih negara-negara dengan teknologi dan kapasitas lebih maju dalam energi terbarukan memiliki keunggulan komparatif yang menguntungkan seiring dengan kebijakan internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan keunggulan yang Indonesia kejar, ini berpengaruh dalam siklus investasi, terlebih dari pasar Eropa yang sudah mengedepankan standar tinggi dalam pengoperasian bisnisnya. Oleh karena itu hal ini menimbulkan tantangan yang berlapis bagi Indonesia ketika Indonesia belum bisa menanggung sepenuhnya biaya energi terbarukan, maka investor yang masuk masih

kurang tertarik karena pemanfaatan energi terbarukan ini mengalami kesulitan.

Dengan demikian untuk Indonesia mempromosikan energi terbarukan, tantangan dan hambatan yang muncul saling terkoordinasi di antara internal dan eksternal. Walau sudah mulai difokuskan, Indonesia sebagai negara dengan perekonomian berkembang belum memaksimalkan kebutuhan energinya oleh karena berbagai aspek lain yang kompleks, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia masih memiliki tantangan dalam transisi energi yang berkeadilan, dimulai dari akses energi bersih, kebutuhan dana yang sangat besar, dan perlunya dukungan riset dan teknologi (KOMINFO, 2022). Hal ini dapat secara tidak langsung terlihat standar yang diberikan organisasi internasional tidak sesuai dengan kemampuan Indonesia yang masih dalam ekonomi berkembang. Sedangkan yang membuat kebijakan internasional adalah negara maju yang sudah memiliki perekonomian baik serta teknologi yang mumpuni. Dengan demikian seharusnya dalam pembuatan regulasi untuk transisi ke dalam energi terbarukan, perlu adanya pemisahan kelompok negara, agar pencapaiannya bisa lebih efisien dan terukur baik. Di lain sisi hal ini berimbas juga pada pemakaian transportasi tenaga listrik yang dapat dikatakan sebagai salah satu cara mengurangi emisi. Namun jika dilihat dari sisi lain, di negara seperti Indonesia yang belum melakukan transisi sumber energinya ke energi terbarukan, langkah ini dapat dikatakan sia-sia atau tidak maksimal. Hal ini dikarenakan jika penggunaan transportasi listrik semakin meningkat namun sumber listrik tersebut masih bergantung pada batu bara, walaupun penggunaan bahan bakar bensin/solar menurun, peristiwa ini justru akan membesarkan pemakaian batu bara ataupun energi fosil sebagai penghasil listrik. Oleh karena itu untuk merencanakan transisi energi dibutuhkan kejelian dan struktur yang baik agar hal yang saling terhubung ini juga

bisa tersinkronisasi dengan baik untuk menciptakan energi dan dampak yang baik untuk lingkungan. Dengan demikian menurut pandangan Neoliberalisme Institusional dalam meningkatkan dan mempromosikan energi terbarukan bagi Indonesia maupun internasional, harus mencapai kerja sama antarnegara dan aktor lain dalam sistem internasional yang penuh dengan anarki demi tercapainya bumi yang lebih baik lagi.

5. Kesimpulan

Dalam penutup, penting untuk merangkum temuan utama yang telah dibahas untuk memperjelas jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Untuk mewujudkan transisi energi ke energi terbarukan, Indonesia menerapkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mendukung percepatan transisi energi. Terdapat tiga strategi Indonesia dalam mendukung transisi energi, yaitu peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Ketiga hal tersebut tentu sangat penting dan satu sama lain berkesinambungan untuk dapat mendukung kesuksesan implementasi strategi energi terbarukan. Kemudian kebijakan-kebijakan terkait transisi energi terbarukan juga telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat melindungi program transisi energi ini, seperti UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi yang berisikan regulasi terkait EBT dan PP No 79 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang menjadi dasar hukum dalam percepatan transisi ini. Berbagai kebijakan dan program telah di inisiasi oleh pemerintah Indonesia seperti meluncurkan ETM Country Platform (ETMPC) yang berperan dalam koordinasi berbagai aspek transisi energi untuk dapat melakukan proses transisi secara adil dari regional hingga nasional. Kemudian terdapat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 35203 pada sektor bio energi dengan menargetkan penggunaan biogas yang signifikan di sektor industri. Lalu Kementerian ESDM juga mencetuskan kebijakan proyek infrastruktur Barang Milik

Negara (BMN) dalam sektor EBT serta mengalirkan dana yang cukup besar untuk menyukseskan sektor EBT dengan target membangun kurang lebih 33.476 unit pembangkit energi terbarukan.

Kemudian, Indonesia telah menggencarkan transisi energi terbarukan melalui diplomasi lingkungannya di forum-forum internasional. Dimana Indonesia mencetuskan berbagai komitmen untuk mendukung percepatan transisi, seperti Energy Transitions Working Group (ETWG), kemudian Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP). Ketiga bentuk komitmen ini bekerja sama dengan negara-negara anggota yang masuk ke dalam forum internasional maupun regional untuk bersama-sama membangun infrastruktur energi terbarukan dan untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kapabilitas ekonomi melalui pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga menghadapi tantangan dan hambatan dalam menggencarkan transisi energi terbarukan, seperti masih memiliki ketergantungan terhadap energi fosil yang tinggi meskipun terdapat peningkatan terhadap energi terbarukan. Hal ini dikarenakan halangan finansial dimana harga energi fosil tergolong murah terutama masih banyak masyarakat memiliki ekonomi menengah ke bawah, akibatnya membuat efek domino yang menyebabkan kurangnya minat investasi dalam aspek EBT, selain itu juga disebabkan oleh kebijakan investasi yang simpang siur. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indonesia harus gencar dalam mencari investor asing terkait dana finansial

dalam mempercepat transisi energi, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia merupakan negara ekonomi berkembang, serta perbaikan kajian-kajian terkait kebijakan investasi dengan tujuan untuk mempermudah investor asing untuk masuk.

Dalam konteks diplomasi lingkungan dan upaya promosi energi terbarukan, hasil penelitian mencerminkan secara nyata prinsip-prinsip Neoliberalisme Institusional yang menekankan untuk mencapai hasil kolektif diperlukan kerja sama antarnegara yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga internasional, melalui lembaga tersebut negara-negara bersama dengan aktor nonnegara dapat melakukan kerja sama yang adil dan berdampak secara kolektif. Terlihat dalam diplomasi lingkungan Indonesia dengan mengajak negara-negara untuk bersama-sama melakukan transisi ke energi terbarukan dalam forum internasional. Untuk mewujudkan perjanjian ini, negara-negara harus bekerja sama untuk mengimplementasikannya. Lembaga internasional juga harus mengawasi dan memberikan panduan dalam melaksanakan implementasinya. Alasan di balik kolaborasi ini berasal dari kesamaan antarnegara di seluruh dunia yang mengalami kemerosotan iklim global.

Dengan demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui upaya promosi energi terbarukan, Indonesia telah secara aktif berkontribusi pada diplomasi lingkungan global dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan komitmen berkelanjutan demi mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjikri, F. (2017). Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik Elektro*, 1(1), 11-12.
<https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikelektro/article/view/667#:~:text=Strategi%20pengembangan%20energi%20terbarukan%20adalah,ET%20dalam%20negeri%20dan%20pembebasan>
- Anomali Iklim dan Rekor Suhu Terpanas Bumi*. (2023, January 21). Kompas.id. Retrieved October 19, 2023, from <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/21/anomali-iklim-dan-rekor-suhu-terpanas-bumi>
- Anwar, R., & Triatmojo, A. (2020, October 23). *Perkembangan Kebijakan Energi dan Kedudukan Energi Terbarukan di Indonesia Saat Ini*. Koaksi Indonesia. Retrieved October 17, 2023, from https://coaction.id/en/perkembangan-kebijakan-energi-dan-kedudukan-energi-terbarukan-di-indonesia-saat-ini/#_ftn1
- Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM*. (2020, October 22). Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM. Retrieved October 21, 2023, from <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/2667/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.di.perlukan?lang=en>
- Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM*. (2022, March 25). Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM. Retrieved October 22, 2023, from <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/03/28/3131/selesai.hari.ini.berikut.update.dari.g20.energy.transitions.working.group.pertama>
- Firdaus, I. (2022, Desember). Policy and Regulatory Support To Accelerate New Renewable Energy Research Activities in Indonesia. *RechtsVinding*, 11(3), 417-427.
- Hambatan Perkembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia*. (2023, July 31). kumparan. Retrieved October 21, 2023, from <https://kumparan.com/solar-kita/hambatan-perkembangan-energi-baru-terbarukan-di-indonesia-20tIKtD9AeQ>
- Humas EBTKE. (2023, February 16). *Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM*. Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM. Retrieved October 22, 2023, from <https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/02/16/3430/sekretariat.jetp.terbentuk.siap.realisasikan.kerja.sama.pendanaan.transisi.energi>
- Indonesia Green Growth Program. (2023, March 9). *Indonesia Luncurkan ETM Country Platform untuk Transisi Energi yang Adil dan Terjangkau*. Indonesia Green Growth Program. Retrieved October 17, 2023, from <http://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-etm-country-platform-untuk-transisi-energi-yang-adil-dan-terjangkau/>
- Indonesia Green Growth Program*. (2023, April 20). Indonesia Green Growth Program. Retrieved October 17, 2023, from <http://greengrowth.bappenas.go.id/peluncuran-kbli-35203-untuk-mendorong-produksi-biogas-dalam-skala-industri/>

- Indonesia Percepat Transisi Energi Melalui Kerja Sama Multilateral.* (n.d.). Indonesia Baik. Retrieved October 22, 2023, from <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-percepat-transisi-energi-melalui-kerja-sama-multilateral>
- Informasi Publik Fiskalpedia Energy Transition Mechanism.* (2022, November 10). Badan Kebijakan Fiskal - Detail Fiskalpedia. Retrieved October 22, 2023, from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/21-energy-transition-mechanism>
- Inilah Daftar Negara dengan Indeks Transisi Energi Terbaik di ASEAN 2021.* (2021, May 11). Good News From Indonesia. Retrieved October 21, 2023, from <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/05/11/daftar-negara-dengan-indeks-transisi-energi-terbaik-di-asia-tenggara-2021>
- JDIH KESDM.* (n.d.). JDIH KESDM. Retrieved October 22, 2023, from <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/186/detail>
- Kemdikbud. (2022, March 2). *Kemendikbudristek Gandeng Kementerian ESDM dan Perusahaan Swasta dalam Inovasi Energi Terbarukan.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia. Retrieved October 22, 2023, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/03/kemendikbudristek-gandeng-kementerian-esdm-dan-perusahaan-swasta-dalam-inovasi-energi-terbarukan>
- Kementerian ESDM. (2023). *Kementerian ESDM RI - Berita Unit - Direktorat Jenderal EBTKE - Strategi Pengembangan EBT Menuju Target 23%.* Kementerian ESDM. Retrieved October 22, 2023, from <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/strategi-pengembangan-ebt-menuju-target-23>
- Kementerian ESDM RI. (2022, January 6). *Kementerian ESDM RI - Media Center - News Archives - Urgensi Transisi Energi dalam Presidensi G20 Indonesia.* Kementerian ESDM. Retrieved October 22, 2023, from <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/urgensi-transisi-energi-dalam-presidensi-g20-indonesia>
- Kementerian Keuangan RI. (2022, July 28). *Presidensi G20, Gimana Persiapan Pemerintah Gairahkan BMN untuk Energi Terbarukan?* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved October 18, 2023, from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/13242/Presidensi-G20-Gimana-Persiapan-Pemerintah-Gairahkan-BMN-untuk-Energi-Terbarukan.html
- Kementerian Komunikasi dan Informatika.* (2022, March 17). Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved October 22, 2023, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40622/presiden-ungkapkan-tiga-tantangan-besar-dalam-transisi-energi-yang-berkeadilan/0/berita>
- Koty, A. C. (2023, January 2). *Indonesia's Just Energy Transition Partnership.* ASEAN Briefing. Retrieved October 22, 2023, from <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-just-energy-transition-partnership/>

- Makin Gerah, BMKG Akui Suhu Indonesia Melonjak Drastis Tahun 2023*. (2023, October 11). CNN Indonesia. Retrieved October 19, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231011091104-199-1009726/makin-gerah-bmkg-akui-suhu-indonesia-melonjak-drastis-tahun-2023>
- Mutia, M. A. A., & Nurjanah, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy. *OISAA Journal of Indonesia Emas*, 2(1), 37-38. <https://ejournal.ppi.id/index.php/oisaa/article/view/39>
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2021, June). Tinjauan Kebijakan Pembiayaan & Investasi Energi Bersih Indonesia. *Clean Energy Finance & Investment Mobilisation (CEFIM)*.
- Pambudi, N. A., & et al. (2023). Renewable Energy in Indonesia: Current Status, Potential, and Future Development. *Sustainability*, 15(3), 24. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2342>
- Renewable Energy Indonesia. (2023, April 20). *Kebijakan Energi Terbarukan | Renewable Energy Indonesia*. Energi Terbarukan & Berkelanjutan | Renewable Energy Indonesia. Retrieved October 19, 2023, from <https://renewableenergy.id/kebijakan-energi-terbarukan/>
- Robertua, V., & Sihura, S. R. (2020). The Rise and the Fall of Indonesia's Climate Diplomacy: Case Study of the Joint Crediting Mechanism in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.18196/hi.91161>
- Rudiany, N. P. (2020). Pentingnya Diplomasi Energi dalam Upaya Mencapai Ketahanan Energi Nasional. *Centre for Strategic and International Studies*, 8-9. <https://www.jstor.org/stable/resrep25407.4>
- Setiawan, V. N. (2022, July 22). Pemerintah Siapkan Rp483 Miliar Untuk Infrastruktur EBT 2022. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220722152824-4-357803/pemerintah-siapkan-rp483-miliar-untuk-infrastruktur-ebt-2022>
- Udin, U. (2020). Renewable energy and human resource development : challenges and opportunities in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy (IJEPP)*, 10(2), 235-236. https://www.zbw.eu/econis-archiv/bitstream/11159/8287/1/175146539X_0.pdf

MCDONALD'S IN INDONESIA AND ITS EMERGING POLITICAL AND SECURITY RISKS

Fauzan Sameer Achmad^{1)*}, Elyzabeth Bonethe Nasution²⁾

¹⁾*Student, Faculty of Social & Political Sciences, International Relations Study Program, Universitas Pelita Harapan*

²⁾*Lecturer, Faculty of Social & Political Sciences, International Relations Study Program, Universitas Pelita Harapan*

e-mail: fauzansam01@gmail.com¹⁾, elyzabeth.nasution@uph.edu²⁾

ABSTRACT

McDonald's was embroiled in controversy following the decision of its branch in Israel to donate the company's food products to the Israel Defense Forces (IDF), which has been accused of committing genocide on the people of Palestine. The company was boycotted by many worldwide, including the people of Indonesia which had always voiced their strong support for Palestine. The situation highlights a possible threat to McDonald's as the independence of its individual national branches could result in clashing actions and negative public reception. Moreover, McDonald's must be wary of the malleable governmental statuses and relationships in the countries it operates in, such as Indonesia, in which it originally opened during an extremely authoritarian regime before the country's shift into a democratic system. However, the tides have been changing once again as recent political events have put Indonesia's democracy under the threat of regression. With this newfound situation, McDonald's must be able to find the proper solutions to address its emerging political and security risks.

Keywords: McDonald's, Indonesia, Democracy, Multinational Corporation (MNC), Risks

1. Introduction

Indonesia's President Jokowi Widodo's second and final term is coming to an end with the next general election scheduled to be held on 14 February 2024. President Widodo's time as president saw the country receiving a record US\$43 billion in foreign investment in 2022, denoting an increase of 44% from 2021 (Maricourt, 2023). This came along with a move by the government to attract foreign investments and companies into Indonesia with the promise of its resources and large consumer market. Indonesia, as a developing country hosting a relatively stable democratic government, is a promising source of profit. The country has seen a rising middle-class with a simultaneously strengthening purchasing power, and this middle-class consumption has served as the country's backbone throughout most of its economic rise, preventing the country's economy from falling into full disrepair during global crisis events like the pandemic. The country hosts a large middle-class population at about 52

million Indonesians.

The World Bank defines a person in the middle-class as someone who uses between US\$7.75 to US\$38 in daily spending. Although 52 million still does not hold a majority to the country's over 275.5 million-large population, it represents a decent proportion and a massive one when compared to the populations of other countries. The amount of expenditure used by the much wealthier middle-class people of a developed country could still be dwarfed by the middle-class of a developing country whose population surpasses it by many digits. Meanwhile, other developing countries don't hold weight to Indonesia's middle-class of 52 million as they might not even have as much of a population, like Brunei Darussalam or Malaysia. Essentially, Indonesia's middle-class should not be underestimated by foreign investors and companies. If a business or company were to be able to hook the country's middle-class successfully, they could be able to profit in exorbitant amounts, much like with the case of the American

multinational fast food chain corporation, McDonald's.

McDonald's has been successful in making Indonesia's middle-class part of their consumer base. Along with its affordable prices, globalization and the company's image as a representation of western food and culture have made it very appealing to Indonesians. Additionally, the high rate of urbanization has led to a change in dietary patterns from the traditional rice-based diet for more wheat-based products like bread, red meat, and poultry, all of which is found in McDonald's' fast food products (Colozza, 2019). The middle-class is also drawn towards McDonald's availability in many locations and the ease of transportation using online delivery services.

McDonald's entered Indonesia with the opening of its first branch in the Sarinah area of Jakarta on the 23rd of February 1991. Following a successful launch, it then opened its first branch outside of Java at Medan, on the island of Sumatra, on the 23rd of September 1994. The rights over the restaurant franchise were first handed over to PT Ramako Gerbangmas before turning into a shared company known as PT Bina Nusa Rama (PT BNR) in 1994, in which 90% of the franchise business was held by the McDonald's International Development Services, and PT BNR controlled the remaining 10%. As McDonald's was an overwhelmingly strong multinational corporation at the time, and Indonesian businesses were struggling in a failing economy, the move was inevitable and signed yet another triumph for wealthy multinational corporations over developing countries. However, McDonald's' success story in Indonesia did not end there, and the franchise opened another 70 branches from 1991 to 2001. By 2003, it had a total of 108 branches. Another fallout ensued in 2009 after McDonald's abruptly disconnected itself from PT BNR and signed with a new partner, PT Rekso Nasional Food (RNF). This caused PT BNR to sue McDonald's at the Judicial Court of South Jakarta, accusing McDonald's

of engaging in alleged illegal activities, agreements, and trades throughout their mutual agreement. The legal battle did not result in any implications for McDonald's despite Indonesia having transitioned into a democratic government. McDonald's continued to receive enormous annual profits and it seemed that a foreign multinational corporation like McDonald's was untouched by both law and public opinion. Nearly two decades later, this conception was proven wrong following the Indonesian public's boycott of McDonald's for aiding Israel in the 2023 Israel and Hamas war.

2. Literature Review

McDonald's' strategy of working with local business partners acts as a double-edged sword. Although the strategy has worked successfully, with the company flourishing in countries of all political and economic systems, the impact of one branch's actions has led to a very costly boycott. The boycott has made a dent in the company's profits and reception, primarily in Asia where most of the world's Islamic population resides and governmental and social support for Palestine is much more common (Nikkei Asia, 2024).

In 2016, the company announced its decision to sell many of its fully corporate-owned stores in Asia. By sharing ownership with local business partners, McDonald's predicts it will be able to open a new 1,500 stores in China, Hong Kong, and South Korea alone. This franchise model is expected to account for 95% of McDonald's business management. The benefits for this strategy include a faster pace of launching locations and the reduction of McDonald's capital requirements in individual countries and bureaucracies. By working together with national businesses, the company is also able to profit from incorporating local foods and flavors into its menu in a process combining business and culture known as "fast food diplomacy" (Herminingrum, 2020). These localized menus have achieved both cultural and economic interests simultaneously.

The franchise model is not without risk as scandals caused by local branches have plagued the company even before the 2023 Israel and Hamas war. A scandal broke out in China in 2014 where McDonald's chicken supplier was found to be unhygienic in its production. The scandal made the company receive a negative earnings impact of \$0.23 per diluted share that same year (US Securities and Exchange Commission, 2015).

Hence, the franchise system of McDonald's offers both social and economic drawbacks and benefits. The dilemma of the franchise system mirrors that of governmental decentralization in which the freedom to enact action leads to further complexity. Yet, the franchise system provides multinational corporations with the local knowledge of entrepreneurs that is greatly valuable (Wang et al., 2006).

3. Research Method

Qualitative research was mainly used for this study to first analyze the impact of McDonald's recent controversy and the risks imposed onto it by Indonesia's regressing democracy. Qualitative research is essential to provide a conclusion as to the political and security risks of McDonald's. The social factor of Indonesia is also taken into account with the costly impact of the public's boycott of McDonald's (Al Jazeera, 2024) and the differing attitudes and effects of the three presidential candidates.

As McDonald's has enjoyed relative business stability throughout its time in Indonesia, an exploratory research method is also utilized to investigate the existence of political and security risks of McDonald's which is otherwise poorly understood. Lastly, by adopting a qualitative research method through an exploratory lens, it is possible to gain knowledge and insight into the volatile relationship between business, government, and society.

4. Results and Discussion

4.1. McDonald's Israel Controversy

McDonald's was embroiled in global

controversy after its Israeli branch donated the brand's food products to Israeli troops fighting Hamas. McDonald's was accused of supporting Israel as a colonial state in its genocidal war against the Palestinian people of Gaza, killing over 25,000 civilians (UN News, 2024) in a land with just 2 million inhabitants. The response to this action was swift in Indonesia, as many consumers immediately boycotted the company, and fuel was added to the fire after Indonesia's largest clerical body, the Indonesian Ulema Council (MUI), decreed a fatwa stating that it was haram or religiously forbidden to directly or indirectly support Israel's violence on Palestine. McDonald's Indonesian branches have seen a noticeable drop in customers (Nikkei Asia, 2024), forcing the company to issue a statement saying that it "hope(d) for a swift achievement of peace so that there will be no more casualties". Additionally, McDonald's Indonesia decided to donate IDR 1.5 billion to Palestine to appease the consumer backlash. As McDonald's affordable prices are catered towards a target audience of primarily lower to middle-class consumers, and Indonesia's prime consumer being that of the middle-class, McDonald's feels that it needs to clean its image and reputation. The boycott demonstrates that large multinational corporations are still susceptible to public and social forces.

The focus on McDonald's has not come at a worse time than during the peak of the Indonesian general election campaign season. As all eyes and ears are on the Israel and Hamas war and the resulting boycotts, any reference by aspiring candidates to Gaza or to Indonesia's Muslim brotherhood with Palestine would only increase the public opposition against McDonald's.

An election won by Anies Baswedan, a known Islamist populist (European Center for Populism Studies, 2023), could indirectly bring an unforeseen wave of attention to the McDonald's controversy and critically damage their reputation. Anies's status as an Islamist populist was influential during the 2016 Basuki Tjahaya Purnama blasphemy

case, and he wields a large authority among Muslim conservatives. Anies met with Rizieq Shihab, the leader of the FPI, Indonesia's hardline Islamist organization. This was done in hopes of obtaining the support of the large Islamist group. The action was in stark contrast to the government's decision to outlaw the FPI in 2020. Anies's actions have signaled support and possible representation of Islamist populists in the case Anies wins. Although it is unlikely that Anies' presidency would outlaw McDonald's over one incident, it would pressure McDonald's into maintaining an appealing image for a growing Muslim middle-class consumer base.

In the second case where Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka win the election, it is unlikely that much would change for McDonald's other than the appeasement of consumers. Prabowo takes on a pro-Palestine stance, having planned to send a national medic boat to Gaza, but the request had not been approved by Egypt to be let through its waters (The Jakarta Post, 2023). Additionally, he oversaw the acceptance of 22 Palestinian students into the University of Defence, essentially training them militarily (Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, 2023). Despite the strong Palestinian support, it is unlikely that his presidency would tie into McDonald's' incident, and the primary objective of his campaign with the president's son is set on continuing President Jokowi's goals, which had long benefitted certain foreign companies like McDonald's.

Similarly, a win for Ganjar Pranowo and Mohammad Mahfud Mahmodin or Mahfud MD is unlikely to change much, as Ganjar also aims to continue the programs and overall business regulations of President Widodo's administration. Ganjar had previously voiced strong support and action for Palestine during his time as the governor of Central Java, by refusing to allow Israel's team to play in the U-20 World Cup in Indonesia, eventually leading to the event itself being canceled and moved to Argentina (CNN Indonesia, 2023).

4.2. McDonald's & Indonesian Democracy

Although much has been discussed regarding McDonald's' one instance of betraying the public's support, which would put it at risk in the society category, the company's biggest risk lies in Indonesia's continuously evolving political theatre. This could be determined by ruling out the other categories one by one. Firstly, Indonesian society has remained at a standstill for some time and is one with an improvement after the country's many inter-ethnic conflicts and myriad of separatist movements that plagued Indonesia from the late 1900s to the early 2000s. Both private sector and social capital conditions are improving (Rahman, 2015). The Indonesian food private sector is booming, with the likes of the Indofood group expanding to Africa and the Americas. It is now common to find the Indonesian noodle product *Indomie* worldwide. Furthermore, although social tension and human security issues are present in Papua, it would not threaten McDonald's unless it ramps up into a situation where countries and the international community accuses McDonald's and other multinational corporations operating in Indonesia of indirectly financing the killings of Papuan civilians through government tax revenue. Thirdly, youth dissatisfaction does not pose a direct threat to McDonald's, with the company instead providing working opportunities to many Indonesian youths in need of employment.

Security is also unlikely to impact McDonald's severely, as it requires a dramatic escalation of national and global unrest to start affecting McDonald's. Indonesia has a history of complying with international law when it comes to its disputes, such as with the case of the Sipadan and Ligitan islands dispute which ended with the International Court of Justice ruling on Malaysia's side. Indonesia accepted the ruling, which shows that the country does not act in a hostile and anarchic manner and refutes the possibility of unexpected

confrontations and changes common in undemocratic countries. As recent as 2022, Indonesia concluded an agreement with Vietnam to finalize their respective EEZ boundaries in the South China Sea following 12 years of negotiation (The Diplomat, 2022). Indonesia's frequent natural disasters and rapid changes by globalization wouldn't damage McDonald's severely either. The base of McDonald's services and production in Indonesia is in Jakarta, which is located in a relatively safe location from sudden large-impact natural disasters like tsunamis and mega-earthquakes, although it is important to note that the city is sinking rapidly (Bloomberg, 2023).

Finally, Indonesia's economy is rebounding successfully after the pandemic and the country's debt is rather low compared to other developing and developed countries (International Monetary Fund, 2022). As of September 2023, Indonesia's governmental debt accounted for 38.1% of the country's nominal gross domestic product (GDP). The country's debt has fallen from a peak of 41.6% during the height of the global pandemic in April 2021, which shows good government monetary management and economic growth. The only possible economic issue lies in Indonesia's extremely weak and volatile currency which greatly limits the profits of McDonald's. The Indonesian rupiah has depreciated by more than 50% against the US dollar between July 2011 and March 2020 and the trend has not stopped (Blanchard et al, 2020). According to Forbes, the Indonesian rupiah ranks sixth of the world's weakest currencies, with 1 rupiah buying only 0.000064 dollar or 1 USD equating to 15.655,60 Indonesian rupiah. The company could also be stunted by Indonesia's weak organization system, especially after the regionalization process that allowed regions and not just Jakarta to monitor and impose their own rules and demands. McDonald's just opened their first branch in Aceh earlier this year, possibly due to the special province's extremely demanding social, political, and financial

rules set by Sharia law.

McDonald's has been enjoying Indonesia's democracy ever since the post-Suharto reformation era began in 1998, and it has ushered in a sense of lawfulness and stability. However, Indonesia's democracy is indicating signs of a decline. McDonald's entered Indonesia during a time in which the country was governed by an extremely authoritarian government controlled by the Suharto regime and its cronies, which is unfavorable for most foreign companies due to the instability of authoritarian countries economically, socially, and politically. McDonald's' Indonesian consumer base kept fluctuating throughout the late 1900s with the occurrence of the 1998 Asian financial crisis and the downfall of the Suharto government, both events happening consecutively and bringing a scale of instability that was unprecedented. Yet McDonald's was able to survive these events and enjoyed Indonesia's newfound stable democracy. The country's democracy took a significant hit during President Widodo's presidency as indicators such as political culture, pluralism, the function of the government, and most significantly the country's civil liberties, are heading on a downward slope. Indonesia was placed 73rd among 179 nations in the annual V-Dem Institute Democracy Report in 2021. The Report of Democracy Index by The Economist Intelligence Unit of the same year gives Indonesia a score of 6.3, the lowest in 14 years of Indonesia's democracy. These reports categorize Indonesia as going from an electoral democracy into a flawed democracy and indicate that it is still prone to political fluctuation and threats of autocracy. Indeed, these threats have appeared and could threaten or fully dismantle Indonesia's democratic core.

Signs of democratic decline began with the government's decision to repress the society's voice through sanctions, legal charges, and dismantling public protests. A notable case was the government's response to the public protest against the Omnibus Law in 2020. The protest began peacefully

but quickly devolved into chaos as police brutality ensued in which students were violently restrained by the police and a video showing the police spraying tear gas to an ambulance went viral. Instances of police brutality have spiked in recent years, with the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) receiving over 1,500 complaints of police brutality during the Omnibus Law protests alone, and the Alliance on Independent Journalists (AJI) and the Legal Aid Institute of the Press (LBH Pers) reports that journalists are often targeted and attacked by the police in protests and public demonstrations over fears of being recorded. There has also been a rise in defamation cases against people criticizing public officials and the government (The Conversation, 2024). Cases like these prevent people from exercising their freedom of speech and classify necessary criticism as hate. It is a very slippery slope where the words of the law are used in bad faith to repress criticism and opposition before the law itself is slowly changed to silence. Any country shifting its political ideology or system is bound to affect its economy, and foreign companies must be aware that Indonesia is under threat. McDonald's must take into consideration its relationship with the government.

Further changes to Indonesia's democracy have occurred throughout the current national general election campaign. The Constitutional Court of Indonesia released a ruling on October 2023 on the eligibility of Gibran Rakabuming Raka, to run as a vice-president candidate. This move was unforeseen as the Indonesian constitution was essentially bent to allow the president's son to surpass the national age regulation. Instances like these conclude that the Jokowi administration and the candidates interested in continuing its legacy are willing to sacrifice and leave behind social and political stability for economic development. It highly mirrors the strategy used by the Suharto regime, which made it susceptible to sudden global changes and public revolution

(European Center for Populism Studies, 2023). If the Widodo government or its future allying presidencies were to suddenly fall, foreign businesses would be encouraged to either adapt to drastic changes or to end business entirely.

Government infighting or dispositions are not the only political and security risk that threatens McDonald's as changes in foreign investment management through nationalization and expropriation are equally destructive. Though McDonald's is currently managed by the Rekso Nasional Food (RNF) company since 2009, McDonald's had previously seized management shares of 90% in 1994, leaving its former Indonesian partner with just 10%. If this were to happen again today and the public and government were to catch on, a controversy could ensue similar to that of the Freeport Mine and business in Papua. The Freeport Mine was brought to public attention once it was learned that the business diverted most of its profits to its US company Freeport-McMoRan, and with the Indonesian government and society enjoying only a little of it despite the mine being on the country's territorial grounds. As a result, the government mandated a requirement for all foreign mining companies to give 51% of their shares to the Indonesian government. Although Freeport is a mining business and McDonald's is a food franchise, the Indonesian society and government puts heavy focus and scrutiny on how much profit the country itself earns from foreign companies investing in it. McDonald's Indonesia must be growing in tandem with the Indonesian society and economy rather than just by itself.

If McDonald's were to be expropriated by the Indonesian government, it would be a big loss to be removed from a developing country with a populous middle-class. However, a nationalized and fully Indonesian McDonald's does not guarantee a win for the government either as history has shown. Back when McDonald's broke ties with its former business partner PT Bina

Nusa Rama (BNR), PT BNR decided to seize the remaining McDonald's branches under its wing into a new restaurant business known as Toni Jack's Indonesia. However, Toni Jack did not survive for long due to a lack of service quality, and the business was eventually closed. Moreover, it indicates that the McDonald's name and international management carries weight of its own and is essential to business.

5. Conclusion

McDonald's as a food franchise company must pay attention to its reputation and relationship with the Indonesian society and government. Knowing that middle-class Indonesians serve as the backbone of not just

its consumer base but the entire Indonesian economy, McDonald's must maintain a clean and friendly image towards them. However, McDonald's' business strategy under the franchise system, which allows it to be held by national businesses and companies makes it hard to distance the actions of foreign McDonald's branches from McDonald's Indonesia in particular. The actions of McDonald's Israel impacted consumers in Indonesia and demonstrated the volatility of name branding and association. Moreover, with Indonesia's declining democracy and focus on government relationships, McDonald's must make sure its profits be seen locally and that it does not make any enemies in the Indonesian society or government.

REFERENCES

- Bachtiar, H. (2023). Indonesian Islamist populism and Anies Baswedan. *Populism & Politics (P&P)*. European Center for Populism Studies (ECPS). doi: <https://doi.org/10.55271/pp0025>
- CNN Indonesia. (2023, 30 March). Respons Pertama Ganjar Indonesia Batal Gelar Piala Dunia: Ya, Kecewa. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230330121525-20-931248/respons-pertama-ganjar-indonesia-batal-gelar-piala-dunia-ya-kecewa>
- Colozza, D. (2019). Urbanisation, dietary change and traditional food practices in Indonesia: A longitudinal analysis. *Journal of Social Science & Medicine* 233. doi: <https://dx.doi.org/10.106/j.socscimed.2019.06.007>
- Fox, J. (2022). How American Fast-Food Chains Have Succeeded in Indonesia. *ASEAN Briefing*. Retrieved from <https://www.aseanbriefing.com/news/how-american-fast-food-chains-have-succeeded-in-indonesia/>
- Habibie Center. (2021). *The Situation of Declining Indonesian Democracy in 2021*. Centre for Politics, Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Retrieved from <https://habibiecenter.or.id/img/publication/825aedce8d3ddbb46b5a4efb69dba59.pdf>
- Herminingrum, S. (2020) A Cultural Dimension of American-Indonesian “Fast Food Diplomacy”. *Humaniora*, Vol. 32, No 1, 1-9. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338953984_A_Cultural_Dimension_of_American-Indonesian_Fast_Food_Diplomacy
- International Monetary Fund. (2022). *Indonesia: 2022 Article IV Consultation-Press Release*. Washington, D.C., USA: International Monetary Fund. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/03/22/Indonesia-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-Staff-Statement-and-515612>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023, 8 November). Menhan Prabowo Terima 22 Mahasiswa Palestina yang akan Kuliah dengan Beasiswa di UNHAN RI. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/2023/11/08/menhan-prabowo-terima-22-mahasiswa-palestina-yang-akan-kuliah-dengan-beasiswa-di-unhan-ri.html>
- Lee, S. T. T. & Sihombing, G. (2023, December 6). The World’s Fastest-Sinking Megacity Has One Last Chance to Save Itself. *Bloomberg*. Retrieved from <https://www.bloomberg.com/features/2023-jakarta-sinking-salim/>
- Llewellyn, A. (2023). Indonesians boycott McDonald’s, Starbucks over support for Israel. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/14/indonesians-boycott-mcdonalds-starbucks-over-support-for-israel>

- Llewellyn, A. (2024, March 20). In Indonesia and Malaysia, boycotts hammer McDonald's, Starbucks. *Al Jazeera*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/economy/2024/3/20/in-indonesia-and-malaysia-boycotts-hit-mcdonalds-starbucks>
- Mann, Tim. (2024, January 9). Indonesia is one of the world's largest democracies, but it's weaponizing defamation laws to smother dissent. *The Conversation*. Retrieved from <https://theconversation.com/indonesia-is-one-of-the-worlds-largest-democracies-but-its-weaponising-defamation-laws-to-smother-dissent-220651>
- Maricourt, F. de. (2023, October 11). Indonesia's golden pathway toward sustainable growth. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/10/11/indonesias-golden-pathway-toward-sustainable-growth.html>.
- Medina, A. F. (2023). Indonesia's Breakthrough Year for Foreign Investment in 2022. *ASEAN Briefing*. Retrieved from <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-breakthrough-year-for-foreign-investment-in-2022/>
- Oceani, D. N. (2023). How Democratic Are We in Indonesia? Retrieved from <https://infid.org/how-democratic-are-we-in-indonesia/>
- Reuters. (2023, October 25). Policy pledges of Indonesia's presidential candidates. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/policy-pledges-indonesias-presidential-candidates-2023-10-20/>
- Shibata, N., Damayanti, I., & Goh, N. (2024, March 7). Indonesia, Malaysia consumer boycotts hit McDonald's, Starbucks and others. *Nikkei Asia*. Retrieved from <https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Indonesia-Malaysia-consumer-boycotts-hit-McDonald-s-Starbucks-and-others>
- The Jakarta Post (2023, December 14). Indonesia awaits Egyptian clearance to dispatch hospital ship to Gaza. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/12/14/indonesia-awaits-egyptian-clearance-to-dispatch-hospital-ship-to-gaza.html>
- Thorbecke, W. (2020). The weak rupiah: catching the tailwinds and avoiding the shoals. *Journal of Social Economic Development*, 23 (Suppl 3), 521-539 (2021). doi: <https://doi.org/10.007/s40847-020-00111-3>
- Rahman, L. (2015). Summary of Indonesia's Private Sector Development Assessment. ADB Papers on Indonesia. Retrieved from <https://www.adb.org/publications/summary-indonesias-private-sector-development-assessment>
- Strangio, S. (2022, December 23). After 12 Years, Indonesia and Vietnam Agree on EEZ Boundaries. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2022/12/after-12-years-indonesia-and-vietnam-agree-on-eez-boundaries/>

United States Securities and Exchange Commission. (2015). *McDonald's Corporation*. Washington, DC, USA: United States Securities and Exchange Commission. Retrieved from <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/63908/000006390816000103/mcd-12312015x10k.htm>

V-Dem Institute. (2021). *Autocratization Turns Viral*. Gothenburg, Sweden: V-Dem Institute at the University of Gothenburg. Retrieved from https://v-dem.net/documents/12/dr_2021.pdf

Wang, et al. (2006). McDonald's Democracy---A Cultural Perspective. US-China Education Trust (USCET). *2006 ASN Conference: Bridging the Sino-American Divide*. Retrieved from https://uscet.org/wp-content/uploads/2020/10/mcdonalds_democracy_-_a_cultural_perspective_by_wang_qing-jiang_zhang_yi-jun.pdf

DISSECTING THE HUMANITARIAN AND ENVIRONMENTAL PRIORITY IN GLOBAL POLITICS

Gloria Miracle Melody Imanuel¹⁾, Guillermo Valles Fani²⁾, Christina Nataysha Supit³⁾, Nathaniel Henry Pandie⁴⁾, Sean Kryzstov⁵⁾*

¹⁾Student, Faculty of Social and Political Science, International Relations Study Program, Universitas Pelita Harapan

²⁾Student, Faculty of Social and Political Science, International Relations Study Program, Universitas Pelita Harapan

³⁾Student, Faculty of Social and Political Science, International Relations Study Program, Universitas Pelita Harapan

⁴⁾Student, Faculty of Social and Political Science, International Relations Study Program, Universitas Pelita Harapan

⁵⁾Student, Faculty of Social and Political Science, International Relations Study Program, Universitas Pelita Harapan

e-mail: gloriamicr15@gmail.com¹⁾, guillervf162@gmail.com²⁾, christinansupit@gmail.com³⁾, nathanpandie23@gmail.com⁴⁾, seantan0807@gmail.com⁵⁾*

ABSTRACT

Human rights and environmental issues have come to be one of the most sought-after topics of discussion and endless debates amongst world leaders and citizens of the Earth. Both topics encompass the concepts of freedom, life and survival for all humans who roam the Earth in an equal manner. As of late, the debate regarding human rights and environmental issues is being overshadowed by conflicts between nations, political and economic rivalry, and a progressive inclination away from a united international society. Although it is understandable as to why world governments would prefer to prioritize such topics of concern, human rights violations outside of such topics along with environmental issues like climate change must not be set aside only to be picked up again some other time of convenience. Therefore, we must investigate ways for us to properly understand the scale of severity and utter importance these topics must remain amidst other conflicts. This paper seeks to do just that, by providing material and explanations regarding the topics and reaching the conclusion. The methodology used to research and collect data includes various credible journals and websites as secondary sources while obtaining its primary sources via interviews with credible experts on the topics that will be discussed.

Keywords: Human Rights, Environment, Climate Change, Violations, Global Politics

1. Introduction

December 10th, 1948 was the day when human rights were first laid out as a united agreement by most countries of the world in the form of a Universal Declaration of Human Rights (United Nations, n.d.). The declaration was meant as a form of universal understanding that there is now a basis of guidelines, rules and laws that prohibit any actor, under any circumstance, from violating the rights of another human being. Countless researchers look at this point, after the tragic and devastating mark left by the First and Second World Wars, as the point in time when the concept and understanding of human rights was born. However, human rights can already be seen to have appeared all over history, long before the Universal Declaration of Human Rights. The

precursor of the UN adopted ideas of human rights, had the idea of natural rights by John Locke during the 17th and 18th centuries (Tuckness & Alex, 2020). Pushing past this, we can go even further and pinpoint the very first instance of human rights being implemented by the Ancient Persian King Cyrus the Great after his conquest of Babylon (Mallowan, 1972). Normally during the period, the people of the conquered land would be forced into slavery or integrated into the conquering kingdom's society. Instead of this happening, Cyrus the Great gave the Babylonians the right to choose their fates in terms of religion and culture and liberated the slaves found there.

Fast-forward to the present time, we live in a much more equal world which proclaims to protect and promote the equal

practice of human rights around the globe. Despite this, human rights are still a massive issue which struggles to be guaranteed to apply to all humans on Earth. This is due to many different factors which mostly, ironically, are caused by other humans opting to strip the rights of others for their benefit. However, another factor that is slowly and progressively affecting human rights while also creating a new front of global issues is the continuous degradation of the global environment. The environment's degradation has been a slow, steady, and progressive issue that affects the world in every possible aspect; with human progression and development increasing whilst environmental stability decreases. The pinpoint root origin of climate change and the global environmental issues can be marked by the first Industrial Revolution (1750–1760) (Mgbemene, et al., 2016), where the first coal factories were created, and the first black fumes covered the skies. Today, we enter the fourth Industrial Revolution and thus incredible new advances have been made in technology. Despite this, global environmental issues have only exasperated and brought on countless victims. From this, it is understood that the condition of the environment will always determine or affect the things living in it. Remove the habitat from the fish tank and you will slowly kill the fish.

Climate change and human rights have always been closely tied together as human rights encompass environmental health and the environment itself influences the fulfillment of human rights. Climate change poses a threat not just to human life, but to all life. Therefore, both human rights and the condition of the environment are interconnected and interdependent on one another to survive. The objective of this paper is to answer the two main research questions centred around how human rights concerns and environmental issues remain crucial in global politics and what measures may be taken to realign the international

society's attention to these paramount topics. The significance of this research paper lies in the very topic of human rights and the environment being slowly and surely discarded from the global political stage as something of the utmost importance to uphold. We have come to see multiple violations of human rights by governments around the world due to direct conflict or policy. Human rights involve all humans on Earth, the environment involves the entire planet which houses all matter of life on Earth. There should be no debate that preserving life on earth and defending the rightful freedom, security, and livelihood of each human should be held dear are the two most important responsibilities the global society needs to fulfil. These act as the main fuel points that will drive this research paper to find a potential conclusion for the current post-pandemic global political condition in reviving human rights and environmental issues.

2. Literature Review

The environment with all that it offers serves as the greatest actor in maintaining human life and their rights. Health as a form of human right has become one of the most prioritized issues, especially after the occurrence of COVID-19, which also plays a certain dynamic towards the global environment. Tracing back to the history of human rights and environmental tragedies throughout recent years, there are essential lessons to learn and new perspectives to look from as it is still ongoing, hence affecting the present condition. Taking three case studies to explore – which cover the Fukushima Nuclear Disaster, the Deepwater Horizon Oil Spill, and the Tibetan Humanitarian and Environmental Crisis – as well as understanding theories including neoliberalism, anthropocentrism, and deep ecology, acts as a framework and foundation in determining one's analysis.

2.1. Neoliberalism

The neoliberalism project first emerged during the Thatcher and Reagan Era. The focus of neoliberalism at the time was to reach two main goals, the first being to build barriers when exercising any public will and the second was to eliminate barriers that left private ownership unaccountable (Lukacs, 2021). Neoliberalist perspectives regarding human rights and the environment are deeply rooted in the economic ideas and concepts in which neoliberals seek to eliminate or greatly reduce state involvement (Chapman, 2019). The Neoliberals argue that the state should have a much-diminished role in human rights as protection and implementation. This is used as a subject of rather strong controversy amongst human rights advocates as some point out the lack of state protection and implementation may fail in the practice of universal human rights as it fundamentally rejects social and economic rights that do not emphasize the individual (Jones & Stafford, 2021). As an example, neoliberals only reject the notion of human rights or rather undermine discourse and language about rights, when it is used as a form of promoting economic equality, but at the same opt to promote human rights and its discourse when discussing free market and individualist values (Cable, 2021). Just as scholar Louiza Odysseos (2010) concluded, “*Human rights belong firmly and fully within the many techniques of neoliberal rule*”. Concerning the environment and environment-related issues, many argue neoliberalism stands in the way of significant progress in deescalating climate change and stabilizing the world since privately owned and free market-based industries are what cause the most environmental damage. The neoliberals beg to differ in that sense by arguing that the cost of stopping growth and development now rather than later down the line will cause massive disparities in the economy (Lukacs, 2021b), cause

distortions in the market and further widen the gaps of wealth and development. Neoliberalism proposes to let the private sector along with the free market resolve environmental issues and opts to allow development and advancements to take their course first before beginning to focus on other concerns like climate change. This proposition reflects the Kuznets curve (Bapna et al., 2022). One crisis at the time would be the neoliberalist perspective.

2.2. Anthropocentrism and Deep Ecology

Anthropocentrism is essentially the belief and following that humans are the very center of all life in the known world and thus gives humans fundamental superiority over all else, providing humans with intrinsic value (Borchard, 2001). Everything else on the earth possess value not to themselves, but rather they gain value by how useful or valuable it is in serving mankind (Padwe, 2013).

However, anthropocentrism has a chance of isolating the importance of humans to the point of completely disassociating themselves with nature and everything else that actually helps humans survive. Therefore, the study of deep ecology, an environmental ethic, plays a very important role properly, balancing anthropocentric beliefs by agreeing that humans are the center of all things, but also emphasizing the importance of a proper relationship between man and the natural world (Borchard, 2001b). It must be understood that humans and the natural world share a cause-and-effect relationship. Human-centered activities can, have, and are affecting the environment in negative ways that they have caused environmental issues like climate change. Meanwhile, on the other end, environmental events have also affected human-centered activities in negative ways in the form of disasters due to climate change. Deep ecology advocates for the pursuit of a global political and personal level of effort and support in

reversing or healing the progress of climate change. Deep ecology emphasizes this by indicating the deep interdependencies found in the biological world which subsequently supplies lives and other essentials to support the lives of individual humans (Grey, 1993).

3. Research Methods

Collecting data from various journal articles and websites has been this paper's main qualitative method. Starting from definitions to case studies, standpoints from various scholars to experts are accumulated and analyzed further in correlation to the post-pandemic condition of human rights and the environment. This paper believes that learning through cases from a national, regional, and global level will be an effective method to answer the questions of the essentiality of human rights and environment in present global politics and the feasible measures taken to secure the focus of the international society to shift back on human rights and environmental issues.

In addition, interviews through Zoom Video Communications and one written form are also organized to serve as a more direct perspective with verbal and non-verbal discussions. The interview covers four questions, with specific backgrounds of each case (Fukushima, the Deepwater Horizon, Tibetan Crisis, and Indonesia) presented before experts express their opinion, with five experts on said topics which are as follows:

- a. Radhe Ayu, *Program Manager SDGs Hub Universitas Indonesia*
- b. Fahrian Yovantra, *Head of Programs at Greeneration Foundation*
- c. Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., *International Relations Lecturer of UPH and Observer of International Relations*
- d. Johannes Herlijanto, M.Si., Ph.D., *Sociologist, Faculty of Social and Politics Lecturer of UPH*

- e. Irma Natalia Hutabarat, S.S., *Environmental Activist, Consultant, and Conservationist*

4. Result and Discussion

4.1. Essentiality of Human Rights and Environment in Present Global Politics

Global politics, although not exactly definable, can be understood as a form of contest between states in the pursuit of their self-interests (Bloor, 2022). Each state has its aim and objective and at some point, some interests may collide and become rivalries, while others intertwine to form alliances. Global politics is the way these states communicate and interact in the international world to promote or push their political objectives to the finish line. Said objectives and interests vary depending on the state and on the theoretical approach one chooses. According to neoliberalism, global politics on the international stage still aims for the greater good of humanity without forgetting about the anarchic international system. Neoliberalism found in global politics would take a much more economically privatized and individualistic view of the world, emphasizing the prioritization of private ownership rights and individual private accountability (Freeman, n.d.). In addition, it prefers to diminish state involvement in most of everything, more specifically eliminating state involvement in the economy and social realms. Subsequently, neoliberalism simply rejects the notion of human rights when it is used by states as political drives and agenda pushing (Chapman, 2019b). Looking at the present condition, one must also understand how the world leans to the North, or the so-called spread of Westernization through the help of globalization, thus introducing Western values to the non-Western world of the East.

This domination of ideals and values was birthed at the age of exploration and colonization beginning with European

empires establishing colonies around the world. Its modern development began during the Cold War under US and Soviet global rivalries. During this time, the US, like the USSR, had begun establishing political connections, forming alliances, friendships, and proxy states, and embedding Western values and ideals into them. This affected the shape and political condition of today thus explaining democracy being the most adopted state ideology. With global politics out of the way, it can now be understood that global politics serves as the push, the stage for change and action amongst states. For this reason, discussions and topics regarding human rights and environmental concerns must remain close to the heart of global politics since both topics essentially involve all countries of all conditions and interests. Human rights are a universal concern simply because it does not discriminate against one state specifically, rather it encompasses and involves all humans, everywhere, all the time.

Human rights are a human interest, and human interest should be everyone's interest. Environmental issues and concerns are another side to the coin of essentials that involves and integrates everything living on earth. The environment is the fundamental source of biological life on Earth. It is also the main and only source of all materials and resources that all living things, including humans, need to survive and thrive. Humans need the environment more than it would need us or perhaps it would be safer to say that humans need the environment for its essential resources that provide humans with the ability to fulfill our needs, and at the same time the environment may need us humans to maintain an ecosystemic balance. In the end, we would be dead without the environment and all forms of importance and interests originally set by states would shift to the pursuit of fulfilling the basic primary needs of survival. Therefore, it goes without saying, that the preservation

of the environment, and subsequently human rights, are fundamental universal interests that all states must uphold and prioritize in some way.

However, despite all this, both human rights and environmental issues have been nearly entirely ignored and dismissed in the global politics of states. The commitment from states to uphold the topics has been null, especially with the current post-pandemic recovery where states' priorities have been overshadowed by wars, conflicts, and economic concerns. This can be seen in the Russian-Ukraine war with the rising innocent death toll and Russian crackdowns on protests, the unreasonable and inhumane regulations imposed by the Chinese Communist Party (CCP) over its people the questionable demand for a zero COVID policy which cut freedom even more (AP News, 2022), starvation across third world countries in Africa, executions by the Myanmar junta, and the most recent women's rights push in Iran after the alleged government authorized killing of a young woman. This underlines the need or rather the ability for governments to commit to extreme measures to secure safety and security yet sacrificing their freedom and rights to that same extreme. A case study of this argument can be found in the case of the Tibetan people and how they are currently suffering from human rights violations and environmental threats.

Tibet is an autonomous region in China that is most well-known to the world for its high mountains, lakes, and rivers, and for its astounding devotion and faith to its religion. Tibet, unfortunately, has been facing countless human rights violations under the leadership and control of the CCP, turning the region into a police state (International Campaign for Tibet, 2020). There, the Tibetan people are prohibited from practicing their religion, face severe social systemic discrimination, and are essentially living in open prison cells (International Campaign for Tibet, 2020b).

This issue has continued to become a large controversy as no clear solution or policy change has arisen to resolve it. Instead, it appears that the situation has worsened to the point where new government programs created by the CCP forced Tibetan nomads to relocate into urban settlements through Mass Relocating and Relocation Programs (International Campaign for Tibet, 2020a). This was seen to fuel the CCP's plans to construct large hydropower stations around the area (International Campaign for Tibet, 2020b). This is another clear act of human rights violations as it strips the Tibetans of their rights as they are not only abused but also reported to be subjects of arbitrary arrests and other forms of discrimination (Yangchen, 2021). When it comes to the CCP's construction programs, it is reported that the Chinese government is openly exploiting Tibet's natural resources recklessly. Their programs to construct large hydropower stations in high-level terrain areas have caused insurmountable losses of land and resources by floods and landslides (Yangchen, 2021b).

Despite the gross violations of human rights and exploitation of the regional environment, the international community has not entirely done anything. Working together through international organizations such as the UN (and all the councils within it), COP26, or other global forums that emphasize the essence of human rights (UNHRC/UNHCR, etc.). As many as 42 UN human rights mandate holders made a joint statement to investigate and report on the human rights situation happening in Tibet with the CCP as the main suspect violator (International Campaign for Tibet, 2022). This, however, did not amount to anything substantial. The failure of global forums to effectively address and resolve humanitarian and environmental concerns is not something new or specific to regions and countries like China.

The Deepwater Horizon oil spill is a case that remains to be properly solved as

the aftermath of the massive spill itself is still going on even to this day, over a decade after the original incident (Cassella, 2022). The incident was caused by British Petroleum (BP) – the company that owned operations and was responsible for Deepwater Horizon – gross negligence over unsafe practices and lack of quality of the rig's construction (US EPA, 2023). Deepwater's flawed design caused the deaths of 11 and injured 17 others, and aside from that, it also caused approximately 134 million gallons of oil to spill into the open waters of the Gulf of Mexico (NOAA, 2020). Spilling is still ongoing to this day, meaning contamination and habitat destruction are still a continuous cycle around the area of the spill. If this continues to progress, there may be chances of irreparable damage environmentally and perhaps even politically between the neighboring countries in terms of humanitarian health.

Therefore, it can be concluded that human rights and environmental issues are at stake due to the potential disasters that may come because of those violations and events. Increasing climate change, the emergence of new diseases, and an unsafe habitat threaten humanitarian well-being. Take Fukushima as a case study example. The residents of the prefecture were forced to abandon their homes, jobs, and overall lives in Fukushima due to the core meltdown. The effects of the eruption not only influenced the economic stability of the region but also displaced hundreds of thousands of residents without homes and stable jobs that could support their families (Collins, n.d.). If humanitarian health and well-being cannot be guaranteed to such an extent, it will soon affect the economy and eventually hit global politics. By then it would already be too late.

4.2. How Tibet and China Contribute to the Global Humanitarian and Environmental Issues

Tibetans have a 'special' connection with the environment they are living in which they ascribe spiritual meanings towards the nature they are surrounded with. What they are applying in their daily lives aligns with the concept of deep ecology where they would feel uncomfortable living separate from nature that they have created a reciprocal connection with. Therefore, the Tibetan people who have stewarded the region's healthy environment to the point of cultivating their own nomadic culture have succeeded in forming a deep bond with the environment. Despite this deep connection, threats arising from climate change and more specifically the exploitation and subjugation of the Tibetan people under the CCP have resulted in the close bond diminishing. The CCP forcing Tibetan nomads into resettlement urban camps outside of their region to construct large hydropower stations/dams in the area are violation of the Tibetan nomads' right to choose ways of living, considering they have been conducting such ways of life for centuries. The CCP has a different perspective on this issue due to the signs of systemic discrimination between the mainland Han people of China and the Tibetans. This form of behavior may be found in the idea of ethnocentrism.

Aside from humanitarian concerns, the effects on the environment because of the CCP's constant exploitation have resulted in floods and landslides around the region, further risking lives and damaging the environment permanently. This spread of progress from the CCP has only caused more and more irreversible damage to the environment in Tibet and has forced its people under police states. In conclusion, the more China is growing, the more the people and the environment are affected—posing a greater threat of humanitarian and environmental crises to its growth as a

country. Where for this matter to conclude, a middle ground followed by a cause-and-effect analysis between both must be uncovered.

4.3. Effect of the Ongoing Deepwater Horizon Oil Spill on US-Mexico Relations

The Deepwater Horizon Oil Spill back in 2010 can be considered the largest marine oil spill incident in history. Its aftermath included approximately 134 million gallons spilling into open waters from the Gulf of Mexico and severe damage to the marine environment around it. Despite the incident occurring over a decade ago, spilling has not stopped. Fortunately, the potential for the US-Mexico relations to deteriorate due to this concern is rather low as both states seek benefits from one another in multiple spectrums and thus prevent measures of conflict from taking place between the two. However, the main point of this issue is not the conflict between the two countries but rather BP's action to pay back to these affected countries. It has been doing well with the US but not with Mexico and it is a major problem for the people who are living there since the fishermen's lives are dependent on collecting fish and shrimps but halted due to the oil spill. The job loss will potentially lead to overpopulation in cities where they seek new jobs, including the US—causing larger humanitarian problems that impact the relationship they both have. Deep ecology comes into play here as the Biden administration has increased the nation's efforts via new policies and federal orders to progress the nation into the process of green transitioning.

This signifies an awakening under the Biden administration to recognize the importance of a proper relationship between man and the natural world, which could then spark encouragement from the US to Mexico to instill new agreements regarding green transitioning neoliberalism

also takes a defining role here as seen with the US and Mexican trade of oil in the Gulf of Mexico. Bilateral relations between the neighboring countries include the free trade and privatized industry (BP oil company) of oil as one of the largest commodities and interests for political and economic relations (ITA, 2023). Therefore, it can be understood that any form of conflict between the two nations is rather unlikely seeing that they are interdependent for the free trade of oil commodities, while also acknowledging the blame of the incident being brought back to the BP oil company.

4.4. Preventing Another Fukushima Nuclear Disaster Among ASEAN Member States

Anthropocentrism plays a large part in explaining the dangers of beholding nuclear power towards human safety, but this problem can be answered through the lenses of neoliberalism since Indonesia is engaging in serious discussions about nuclear power alongside ASEAN member states. Indonesia has established BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional/National Nuclear Energy Agency) to manage nuclear energy and so far, has been successful in its commercial scale operations in West Borneo alongside other institutions and maintains relatively good safety of its employees.

International politics also plays a role in properly defining and representing nuclear power/energy on the international stage to avoid misinterpretations. There must be mutual understanding within the international politics framework to establish discussions and showcases to determine if a country is indeed using nuclear power as a source of clean energy or a source of military might. This, followed by guidelines provided by Japan will help a country decrease the probability of risking humanitarian security. Deep ecology roots also plant themselves here as countries that use nuclear energy as a clean alternative are one step closer to repairing

the environment, despite the rather large risk involved in which anthropocentrism ideals may begin to take control to prioritize human wellbeing above all else. Anthropocentrism takes another role here as it discusses the risks that may threaten the security and health of humans themselves as nuclear power may invite conflict from foreign powers, mishandling of nuclear power may also directly threaten humanitarian preservation as seen in Fukushima.

4.5. Indonesia's Red Line and Government Contribution to Improving the People's Welfare

Not meeting necessities as a human being is poverty at the very basic level and it is because the people are disconnected from nature where citizens easily dump waste into the rivers, deforestation, illegal mining, and other environmental crimes which sadly is the reality of Indonesia. Therefore, the poverty cycle cannot be cracked since the urgency is not properly addressed by the government and we only see it as one form of economic mismanagement when it is deeper than that. Moreover, the need to collaborate will be a better option to continue the implementation of the environmental policies created rather than giving out money on new commitments and agreements. Lack of political will and commitment is what is holding the government to act upon the environmental reality that they are in—consumed in their egoistic satisfaction and needs which is corruption. Since they are the regulator, they must set an example to the public and continue to educate them on how pressing this issue is.

This has been a major struggle and a moral dilemma that has plagued both ends of the argument. This has been an issue since on one side natural resources are running out and on the other, waste and pollution are progressively increasing because of that. The theories of

anthropocentrism and deep ecology both appear to contradict one another in a competition of which is more crucial for the overall aim. Human development always comes at the cost of environmental preservation as humans require natural resources that are deemed most effective and practical. This leads to the use of scarce resources and nonrenewable energy which both can harm the environment. The pursuit of environmental preservation and recovery also comes at the cost of halting human development as resources are preserved and the use of practical and effective means of energy is cut off. Neoliberal aspects of this dilemma are found in the lack of government action to settle the issue as the nation's economy and the free market itself will be at risk.

4.6. Feasible Measures for the Global Society: Refocus on Environmental and Human Rights

Before diving into the feasible measures, it is essential to look over and understand the gap between reality and neoliberalism, followed by its contrast-and-complete relationship with liberalism theory. Neoliberalism seeks to 'eliminate' the state and focuses on individual responsibility in tackling humanitarian and environmental issues. Nonetheless, within the current global politics and society, such elimination is not possible as states hold the power and responsibility to deal with these matters. This is where liberalism fits in to complete the neorealist perspective. Upholding the genuine thought of cooperation to reach the greater good, liberals are sometimes considered too optimistic or utopian to be true. Realization of this theory can be seen through efforts poured in by world leaders in COP 27 or the G20 Framework, where countries gather and discuss establishing climate frameworks that support sustainable living conditions in terms of human rights. Despite this thought, it is ought to believe

and be aware that humanitarian and environmental issues are a problem for all individuals, not limited to certain *powerful* states or their leaders. Hence, referring back to the point raised by neoliberals that do not rely on state intervention or role to solve any sort of issue.

For all of this to work smoothly and effectively, all people must collectively understand that they have a communal and individual responsibility to respond to global concerns like human rights and the environment. Human rights are rights for all humans, and the environment is for the survival of all things. Nationally, governments must first educate their citizens about the dangers and importance of both human rights and the environment. Incentives must be placed initially to maintain participation and collective understanding. A culture of a sense of priority and understanding must be cultivated, which can be done with the help of NGOs. Governments can then proceed with national policies and enforcement of laws and norms. With national measures taken, regional measures should be more smoothly operated as long as all region members agree with one another regarding their priorities. Establishment of regional agreements and joint multilateral initiatives to advocate and promote. Supply a new addition to the regional identity that is centered around human rights defense and enforcement, and environmental efforts. Global measures can be done via IOs like the UN where global politics may come into play to promote pursuits of human rights enforcement and more concrete environmental programs with realistic and achievable aims. Essentially, each unit level has its role to play.

Indonesia already possesses well-calculated policies, examples like KLHS or Indicator Data for SDGs which balances out the dilemma of human development and environmental sustainability that cannot be properly enforced (Admin, 2023). It is due to the absence of a check and balance

system enhanced monitoring procedures that would ensure the effectiveness and the outcomes of the environmental policies they produced. Other than that, multi stakeholder partnership answers this problem by collaboration that involves the government, CSOs, private sectors, and the people in general, especially those from the rural areas. Each of them has separate roles where the private sector will give aid, the CSO to ensure the progress of development in the rural areas, and routine reports and participation from the people there. Bali for instance has met the objective of collaboration since there is a close approach brought by the CSOs, locals, and even indigenous people with the government's policy of 'free from plastic' but it did not fulfill the whole goal of being sustainable since there is no proper check and balance system.

5. Conclusion

The current state of discussions and topics surrounding global politics in the world has been that of ongoing wars, conflicts, geopolitical tensions, economic rivalries, and shifts in power dynamics. Although it should be expected that global politics are under the strong influence of said events and conditions, it has also greatly overshadowed two immensely important discussion topics that should be

inseparable from any global political discussion. Human rights and the environment have met a steady downfall of irrelevance amongst global political talks, especially ever since the COVID-19 pandemic and the current global conflicts that are taking place. Thus, violations of human rights are overlooked, and environmental degradation is dismissed as a minor concern. This massive issue does not only concern the state but also concerns the individuals as it demands a communal and individual responsibility to respond to global concerns. Nationally, governments must first educate their citizens about the dangers and importance of both human rights and the environment. With national measures taken, regional measures should be more smoothly operated as long as all regional members agree with one another regarding their priorities. Global measures can be done via IOs like the UN where global politics may come into play to promote pursuits of human rights enforcement and more concrete environmental programs. Indonesia already possesses well-calculated policies, examples like KLHS or Indicator Data for SDGs, along with assistance from CSOs, private sectors, and locals like in Bali. Essentially, each unit level has their own specified role to play.

REFERENCES

- Admin. (2023, July 27). Penyusunan dokumen Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD yang terintegrasi kedalam TPB adalah wajib dilakukan oleh Kab/Kota/propinsi tahun 2023-2024. Retrieved from <https://sdgscenter.unhas.ac.id/penyusunan-dokumen-kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-rpjmd-yang-terintegrasi-kedalam-tpb-adalah-wajib-dilakukan-oleh-kab-kota-propinsi-tahun-2023-2024/>
- Anthropocentrism. (n.d.). Retrieved from <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199830060/obo-9780199830060-0073.xml>
- Borchard, F. (2001a). Animal rights in research and research application. In Elsevier eBooks (pp. 505–510). <https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/00174-1>
- Borchard, F. (2001b). Animal rights in research and research application. In Elsevier eBooks (pp. 505–510). <https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/00174-1>
- Cable, I. (2021, April 27). The complicity of human rights in neoliberalism: Beyond redemption? — Human Rights Pulse. Retrieved from <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/the-complicity-of-human-rights-in-neoliberalism-beyond-redemption>
- Cassella, C. (2022, August 9). Deepwater Horizon oil spill still detectable 10 years later, scientists say : ScienceAlert. Retrieved from <https://www.sciencealert.com/ten-years-after-the-deepwater-horizon-catastrophe-oil-residue-remains>
- Chapman, A. (2019a, June 1). Being Bold about Rights in a Neoliberal World. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586979/>
- Chapman, A. (2019b, June 1). Being Bold about Rights in a Neoliberal World. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586979/>
- China security forces are well-prepared for quashing dissent | AP News. (2022, December 2). AP News. Retrieved from <https://apnews.com/article/health-china-beijing-covid-government-and-politics-55ae2d4f939e82b206f3661d9209f2e6>
- Collins, T. C. (n.d.). Great East Japan Earthquake: economic and trade impact. Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved from <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/great-east-japan-earthquake-economic-and-trade-impact.pdf>
- Cyrus the Great (558-529 B.C.) on JSTOR. (1972). www.jstor.org. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/4300460>
- Deepwater Horizon – BP Gulf of Mexico oil spill | US EPA. (2023, August 14). Retrieved from <https://www.epa.gov/enforcement/deepwater-horizon-bp-gulf-mexico-oil-spill>

E-International Relations. (2022, August 9). Understanding Global Politics – E-International Relations. Retrieved from <https://www.e-ir.info/publication/understanding-global-politics/>

Freeman, M. F. (n.d.). Neoliberal Policies and Human Rights. Neoliberal Policies and Human Rights, 141–164. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753653>

Grey, W. (1993). Anthropocentrism and deep ecology. Australasian Journal of Philosophy, 71(4), 463–475. <https://doi.org/10.1080/00048409312345442>

International Campaign for Tibet. (2020a, January 29). Tibetan Environment - International Campaign for Tibet. Retrieved from <https://savetibet.org/why-tibet/tibetan-environment/>

International Campaign for Tibet. (2020b, January 29). Tibetan Environment - International Campaign for Tibet. Retrieved from <https://savetibet.org/why-tibet/tibetan-environment/>

International Campaign for Tibet. (2020c, January 29). Tibetan Refugees - International Campaign for Tibet. Retrieved from <https://savetibet.org/why-tibet/tibetan-refugees/>

International Campaign for Tibet. (2020d, January 29). Tibetan Refugees - International Campaign for Tibet. Retrieved from <https://savetibet.org/why-tibet/tibetan-refugees/>

International Campaign for Tibet. (2022, June 28). In the spotlight again: China and Tibet at UN Human Rights Council. Retrieved from <https://savetibet.org/in-the-spotlight-again-china-and-tibet-at-un-human-rights-council/>

ITA. (2023, November 5). Mexico - Oil and gas. Retrieved from <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-oil-and-gas>

Jones, E.-A. J., & Stafford, R. S. (2021). Neoliberalism and the Environment: Are We Aware of Appropriate Action to Save the Planet and Do We Think We Are Doing Enough? Earth 2021, 2, 331–339. Retrieved from https://mdpi-res.com/d_attachment/earth/earth-02-00019/article_deploy/earth-02-00019.pdf?version=1624270786

Locke's Political Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy). (2020, October 6). Retrieved from <https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/#NatuLawNatuRigh>

Lukacs, M. (2021a, August 25). Neoliberalism has conned us into fighting climate change as individuals. The Guardian. Retrieved from <https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/jul/17/neoliberalism-has-conned-us-into-fighting-climate-change-as-individuals>

- Lukacs, M. (2021b, August 25). Neoliberalism has conned us into fighting climate change as individuals. The Guardian. Retrieved from <https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/jul/17/neoliberalism-has-conned-us-into-fighting-climate-change-as-individuals>
- Mgbemene, C. A., Nnaji, C. C., & Nwozor, C. (2016). Industrialization and its Backlash: Focus on Climate Change and its Consequences. *Journal of Environmental Science and Technology*, 9(4), 301–316. <https://doi.org/10.3923/jest.2016.301.316>
- NOAA. (2020). Oil Spills. Retrieved from <https://www.noaa.gov/education/resource-collections/ocean-coasts/oil-spills>
- Odyseos, L. (2010, May 1). Human rights, liberal ontogenesis and freedom: producing a subject for neoliberalism? Retrieved from https://sussex.figshare.com/articles/journal_contribution/Human_rights_liberal_ontogenesis_and_freedom_producing_a_subject_for_neoliberalism_/23323121
- The environment beyond neoliberalism: Delivering sustainable growth | Brookings. (2022, March 9). Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/the-environment-beyond-neoliberalism-delivering-sustainable-growth/>
- United Nations. (n.d.). Universal Declaration of Human Rights | United Nations. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Yangchen. (2021a, March 10). The crisis in Tibet: Six decades and counting - Central Tibetan Administration. Retrieved from <https://tibet.net/the-crisis-in-tibet-six-decades-and-counting/>
- Yangchen. (2021b, March 18). Tibet: an environmental crisis in waiting - Central Tibetan Administration. Retrieved from <https://tibet.net/tibet-an-environmental-crisis-in-waiting/>

ANALISIS RISIKO POLITIK DAN KEAMANAN PT FREEPORT INDONESIA SEBAGAI DAMPAK DARI KEBIJAKAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU 2024

Sisilia Putri^{1)*}, Qanszelir GB Pandjaitan XIV²⁾

¹⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: 01043210021@student.uph.edu¹⁾, qanszelir.pandjaitan@uph.edu²⁾

ABSTRAK

Visi dan misi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 berpotensi melahirkan perubahan regulasi, kebijakan, dan tata kelola industri tambang di Indonesia. Perubahan tersebut menimbulkan risiko politik dan keamanan bagi industri pertambangan asing, salah satunya adalah PT Freeport Indonesia dengan investasi McMoRan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perubahan politik terhadap kestabilan operasional PT Freeport Indonesia, mengidentifikasi peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, serta mengusulkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk menguraikan fenomena tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis komparatif melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi risiko politik dan keamanan pada kestabilan operasional Freeport McMoRan dalam konteks *cohesiveness of government*, *strength of within-system opposition*, *rule of law*, dan *corruption*. Pengetatan regulasi pada kepemimpinan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diproyeksikan akan mengganggu atau mengubah kondisi operasional PT Freeport Indonesia. Sementara itu, kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi Freeport - McMoran. Adapun, penekanan regulasi tata kelola pada kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menimbulkan ketidakpastian bagi industri tambang dan investasi di Papua. Regulasi kepemimpinan mendatang menjanjikan perubahan positif bagi pembangunan dan lingkungan di Indonesia, tetapi perubahan kebijakan yang terlalu drastis dapat berdampak negatif bagi perusahaan tambang dan investasi jangka panjang.

Kata kunci: Analisis Risiko Politik dan Keamanan, Industri Pertambangan, Freeport McMoran, Analisis Komparatif, Pemilu 2024

ABSTRACT

The visions and missions of each presidential and vice-presidential candidate pair in the 2024 elections have the potential to create changes in regulations, policies, and governance of the mining industry in Indonesia. These changes pose political and security risks for foreign mining industries, one of which is PT Freeport Indonesia with McMoRan investments. This study aims to explore the impact of political change on the operational stability of PT Freeport Indonesia, identify the role of government policy in addressing economic inequality, and propose more inclusive and sustainable policy alternatives. To spell out the phenomenon, the researcher used qualitative research methods with comparative analysis techniques through documentation studies. The results show there are potential political and security risks to Freeport McMoRan's operational stability in the context of cohesiveness of government, strength of within-system opposition, rule of law, and corruption. The tightening of regulations under the leadership of Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar are projected to disrupt or change the operational conditions of PT Freeport Indonesia. Meanwhile, the leadership of Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka are not considered to have a significant impact on Freeport-McMoran. Meanwhile, the emphasis on governance regulations under the leadership of Ganjar Pranowo and Mahfud MD will inflict uncertainty for the mining industry and investment in Papua. The upcoming leadership regulations promise positive changes for development and the environment in Indonesia, but too drastic policy changes could negatively impact the mining companies and the long-term investments.

Keywords: Political and Security Risks Analysis, Mining Industry, Freeport McMoran, Comparative Analysis, 2024 Election

1. Pendahuluan

Freeport-McMoRan adalah perusahaan global yang bergerak di sektor pertambangan dengan fokus utama pada tambang tembaga dan emas. Salah satu anak perusahaannya, PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia atau PTFI merupakan bagian dari Freeport- McMoRan & Gold Company (FCX), sebuah perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang aktif sejak April 1967. PTFI, afiliasi langsung dari Freeport, berfokus pada eksplorasi, penambangan, dan pemrosesan mineral seperti tembaga, emas, dan perak di Provinsi Papua, Indonesia. Lokasi operasi utama perusahaan ini adalah di Kabupaten Mimika, Papua, yang dikenal dengan sebutan tambang Grasberg, sebuah sumber daya alam berharga dan salah satu tambang terbesar di dunia. Operasinya memberikan kontribusi besar pada ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan kontroversi terkait dampak lingkungan, sosial, dan keamanan (Rahayu, et.al., 2022).

Perusahaan McMoran, memiliki kendali atas PT Freeport Indonesia sejak mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia pada tahun 1967. Konflik muncul seiring waktu, terutama seputar perjanjian kontrak karya yang mengatur operasi tambang Grasberg. Salah satu permasalahannya adalah pembagian keuntungan, tanggung jawab lingkungan, dan keterlibatan perusahaan terhadap masyarakat lokal. Investasi McMoRan, yang kemudian bergabung dengan Freeport, adalah dasar utama untuk ekspansi mereka dalam industri pertambangan di Indonesia, terutama terkait tambang Grasberg (Ramadhani, 2022). Ini membuat mereka memiliki peranan dominan dalam sektor pertambangan, menghasilkan kontribusi ekonomi yang besar, tetapi juga memunculkan kontroversi terkait cara mereka menjalankan operasi. Freeport-McMoRan dan investasi McMoRan di Indonesia, melalui PT Freeport Indonesia, mencerminkan pentingnya investasi asing di sektor pertambangan. Operasinya menjadi pusat perhatian karena dampak ekonomi

yang besar dan dampaknya pada lingkungan hidup, sementara juga menjadi sumber konflik terkait isu-isu hak, keadilan, dan lingkungan.

Keberadaan Freeport di Papua menimbulkan sejumlah kontroversi. Beberapa pelanggaran terjadi di Indonesia, termasuk klaim kompensasi atas tanah masyarakat, dampak lingkungan dari kegiatan eksplorasi tambang, isu terkait kontrak karya serta ketidaksetaraan antara pekerja asing dan lokal, terutama pekerja dari Papua. Konflik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan ini berlanjut menciptakan ketegangan dan konflik. Isu lingkungan kerap menjadi sorotan utama karena operasi tambang ini berdampak besar pada ekosistem Papua. Di samping itu, masalah hak asasi manusia dan tuntutan pemberdayaan masyarakat setempat juga menjadi perhatian penting, mengingat dampaknya pada komunitas di sekitar tambang.

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo memunculkan potensi perubahan dalam regulasi, kebijakan, dan tata kelola industri tambang di Indonesia. Kebijakan-kebijakan baru, terutama terkait lingkungan, peraturan investasi, dan konsesi operasional, bisa menjadi fokus utama bagi pemerintah baru dalam mengatur sektor ini. Hal ini menimbulkan risiko politik bagi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor pertambangan, termasuk Freeport-McMoRan. Selain risiko politik, risiko keamanan juga menjadi perhatian utama. Wilayah Papua di Indonesia telah mengalami ketegangan dan konflik sosial yang terkait dengan operasi tambang, terutama terkait hak dan keadilan sosial, ekonomi, serta hak-hak adat masyarakat lokal. Kestabilan keamanan di wilayah ini mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan-perusahaan tambang.

Investasi Freeport McMoRan (FCX) di PT Freeport Indonesia (PTFI) mencakup beberapa proyek yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pengembangan perusahaan. Pada Oktober 2023, Presiden

Joko Widodo dan *Chairman* Freeport McMoran, Richard Adkerson, membahas terkait penambahan saham pemerintah sebanyak 10% di PTFI. Hal ini bertujuan untuk menggantikan pemerintah Indonesia sebagai pemilik kontrak pertambangan, yang sebelumnya diambil oleh pemerintah saat ini sebesar 49% (Muliawati, 2023). Investasi ini bertujuan untuk memperluas pengembangan proyek di Tambang Grasberg, termasuk pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit berbasis gas, yang rencananya akan menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu. Freeport-McMoRan Inc. (FCX) bersama dengan PTFI membangun negosiasi untuk mendapatkan perpanjangan kontrak selepas tenggat konsesi 2041 di Kucing Liar. Rencana investasi nol emisi karbon perseroan juga ikut jadi perhitungan sampai 2060 mendatang.

Pasca akhir periode kepemimpinan Jokowi dimulai, perubahan dalam strategi pemerintah terhadap konflik di Papua dapat berdampak pada keamanan operasional perusahaan seperti Freeport-McMoRan. Kendati ada potensi perubahan signifikan pasca-periode kepemimpinan Presiden Jokowi, hal ini juga dapat memunculkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional. Perubahan kebijakan yang tidak terduga atau ketidakstabilan politik dapat menyulitkan perusahaan untuk merencanakan investasi jangka panjang dan menghadapi tantangan keamanan yang lebih besar.

Pada umumnya, menjelang pemilu, terutama di negara dengan sejarah politik yang dinamis seperti Indonesia, perusahaan multinasional sering menghadapi sejumlah risiko politik yang dapat memengaruhi investasi mereka. Adapun PT Freeport-McMoRan, perusahaan tambang yang memiliki keberadaan yang signifikan di Papua, Indonesia, dapat dihadapkan pada risiko-risiko berikut menjelang pemilu. Setelah pemilu terdapat kemungkinan akan ketidakpastian dalam kebijakan. Calon atau partai yang berbeda dengan visi politik yang berbeda dapat mengubah atau merevisi

kebijakan ekonomi, pajak, atau lingkungan yang pada gilirannya dapat memengaruhi Freeport. Perubahan kebijakan ini bisa mengganggu rencana bisnis dan operasional perusahaan.

Pemilu di Indonesia kerap kali memicu ketegangan politik dan sosial di berbagai daerah, termasuk tempat operasional Freeport di Papua. Ketegangan politik lokal yang meningkat bisa berdampak buruk pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta dapat menimbulkan risiko demonstrasi atau protes yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Perusahaan pertambangan sering kali terlibat dalam isu lingkungan yang sensitif. Adanya perubahan kebijakan lingkungan pasca-pemilu dapat mempengaruhi perizinan, tuntutan lingkungan, atau aturan baru terkait keberlanjutan, yang kemudian dapat memengaruhi operasional perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan yang berjudul “Analisis Risiko Politik dan Keamanan PT Freeport Indonesia sebagai Dampak dari Kebijakan Calon Presiden-Wakil Presiden Pemilu 2024”, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari tulisan ini. Pertama, penelitian karya Rahayu, Intan, Cecep Safa’atul Berkah, dan Nurillah Jamil Achmawati Novel (2022) dengan judul “Studi Kasus Analisis Proses Negosiasi PT Freeport Dengan Pemerintah Indonesia”. Secara garis besar tulisan ini menjelaskan bagaimana proses negosiasi yang terjadi antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, termasuk latar belakang, isu-isu utama yang dibahas, serta hasil kesepakatan yang dicapai. Analisis terperinci tentang bagaimana proses negosiasi tersebut mempengaruhi hubungan politik antara perusahaan tambang dan pemerintah, menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri.

Hasil dari penelitian itu menganalisis bahwa dalam negosiasi ini pihak Indonesia berada di posisi yang diuntungkan, dapat dilihat dari tempat negosiasi yang berada di

wilayah Indonesia, sedangkan PT Freeport merupakan pihak asing yang berinvestasi di wilayah Indonesia dan belum memenuhi kebijakan izin usaha di Indonesia. Tapi di sisi lain, pihak masyarakat yang terlibat konflik di kawasan Freeport masih belum menemui titik terangnya. Proses negosiasi memakan waktu bertahun-tahun hingga pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi ini mampu mencapai titik temu sesuai kesepakatan dan porsinya masing-masing melalui strategi *win-win solution*. Dengan merujuk pada penelitian ini, penelitian berikutnya dapat memperoleh landasan yang kuat untuk menganalisis hubungan antara faktor politik dan kegiatan bisnis PT Freeport di Indonesia, khususnya dalam konteks negosiasi dengan pemerintah dan dampaknya terhadap risiko politik yang dihadapi perusahaan sekaligus memperoleh landasan yang kuat untuk menganalisis hubungan antara faktor politik dan kegiatan bisnis PT Freeport di Indonesia. Penelitian ini belum sepenuhnya menjelajahi dampak perubahan politik, khususnya menjelang akhir masa jabatan seorang Presiden terhadap kestabilan operasional dan strategi perusahaan seperti PT Freeport.

Oleh sebab itu tulisan ini selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan politik di tingkat nasional dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan regulasi, serta bagaimana perusahaan seperti PT Freeport menanggapi dan mengelola risiko yang terkait. Meskipun penelitian telah menggarisbawahi peran Freeport Indonesia dalam memperluas ketimpangan kekayaan di Indonesia, masih perlu dipelajari lebih lanjut bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia berkontribusi pada dinamika tersebut. Penelitian selanjutnya akan menggali lebih dalam tentang kebijakan politik dan ekonomi yang mendukung atau bahkan memperkuat posisi Freeport Indonesia dalam ekonomi Indonesia setelah berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Penelitian kedua, berjudul "Kajian Kasus Freeport Sebagai Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Menggunakan

Pendekatan Neomarxisme" yang ditulis oleh Alfina Novia Ramadhani. Tulisan ini menganalisis ketimpangan pendapatan di Indonesia, khususnya terkait dengan peran PT Freeport. Tulisan oleh Alfina dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana kesenjangan ekonomi mempengaruhi dinamika hubungan antara perusahaan dan pemerintah. Penelitian ini menganalisis kasus ketimpangan pendapatan di Indonesia, khususnya terkait dengan peran PT Freeport. Perspektif Neomarxisme memberikan perhatian terhadap bagaimana kapitalisme dan kebangkitan Freeport Indonesia telah menyebabkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok yang lebih kecil. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan menguasai sumber daya alam negara, Freeport Indonesia telah berperan dalam memperluas kesenjangan kekayaan di Indonesia. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana Freeport-McMoran telah menerima manfaat yang tidak proporsional dari situasi tersebut, yang lebih memperkuat pembagian sosial yang ada dan mendorong komunitas lokal ke pinggiran. Perspektif Neomarxisme menyoroti biaya sosial dan ekologis dari ketimpangan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang dalam tentang dinamika ketimpangan ekonomi dan implikasinya terhadap masyarakat dan lingkungan di Indonesia.

Meskipun kedua penelitian ini memberikan pengetahuan yang berharga, masih ada beberapa aspek yang belum tercakup sepenuhnya. Misalnya, peran kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi dinamika hubungan antara perusahaan dan pemerintah, serta alternatif kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengisi celah ini dengan melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang dampak perubahan politik terhadap kestabilan operasional PT Freeport, serta mengidentifikasi peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, dan mengusulkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian,

penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam konteks PT Freeport.

3. Metode Penelitian

Pada tulisan ini digunakan pendekatan kualitatif. Penulis memanfaatkan data sekunder berupa laporan berita, jurnal, artikel, dan lainnya, dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip dan laporan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018).

Tujuan yang ingin dicapai ialah memahami fenomena perubahan dinamika politik, khususnya setelah pergantian masa jabatan Presiden Jokowi. Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif komparatif untuk membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2012). Fokus dari penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana visi dan misi pasangan calon presiden-wakil presiden Pemilu 2024 menggambarkan kemungkinan perubahan kebijakan dalam konteks industri pertambangan, yang dapat memberikan dampak terhadap kestabilan PT Freeport Indonesia. Penulis akan membandingkan risiko politik dan keamanan Indonesia di bawah kepemimpinan ketiga Capres-Cawapres Pemilu 2024, dalam aspek *Cohesiveness of Government*, *Strength of Within-System Opposition*, *Rule of Law*, dan *Corruption*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengaruh Kebijakan Politik dan Keamanan Pemerintah Terhadap PT Freeport

Kebijakan politik dan keamanan yang diimplementasikan oleh pemerintah setelah pemilihan presiden 2024 akan sangat memengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan seperti PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu memperhatikan dengan saksama calon

presiden dan wakil presiden yang berkomitmen untuk menciptakan kondisi politik dan keamanan yang stabil dan kondusif bagi investasi asing. Selain itu, kebijakan lingkungan dan perizinan tambang juga akan menjadi fokus utama perhatian perusahaan ini. Calon presiden dan wakil presiden yang akan menjadi pemimpin Indonesia setelah tahun 2024 diharapkan memiliki kebijakan yang berkelanjutan terkait lingkungan dan mampu menciptakan peraturan perizinan yang mendukung kelangsungan operasional perusahaan tambang. Keberlangsungan bisnis PT Freeport Indonesia akan sangat tergantung pada kebijakan politik dan keamanan yang diterapkan setelah pemilihan presiden tuntas.

4.2. Indonesia di Bawah Kepemimpinan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Visi dan misi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar, memiliki potensi untuk menciptakan perubahan dalam kebijakan ekonomi dan lingkungan yang dapat berdampak pada PT Freeport Indonesia dan investasi McMoRan, terutama di wilayah Papua. Anies Baswedan dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kehadiran Muhaimin Iskandar juga memberikan sentuhan kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong pembangunan daerah. Visi Anies Baswedan yang lebih berfokus pada keberlanjutan lingkungan dapat memunculkan kebijakan yang lebih ketat terkait praktik tambang, terutama terkait eksploitasi sumber daya alam di Papua (*Indonesia Adil Makmur untuk Semua*, n.d.). Potensi pembatasan operasional atau pengetatan regulasi lingkungan mungkin menjadi fokusnya, yang pada gilirannya dapat mengubah kondisi operasional PT Freeport Indonesia. Ini bisa termasuk persyaratan baru terkait rehabilitasi lingkungan dan peningkatan pajak atau royalti yang dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan tambang tersebut.

Selain itu, terkait dengan *Cohesiveness of Government*, Visi dan misi yang diusung oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memerlukan tingkat kesatuan dalam pemerintahan untuk implementasinya. Konsistensi dan keselarasan dalam kebijakan antar departemen dan tingkat pemerintahan adalah kunci untuk menghadapi tantangan kompleks terkait investasi dan lingkungan di Papua (Puspadini, 2023). Kebijakan pembangunan dan kesejahteraan sosial pasangan calon ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan di Papua. Ini mungkin termasuk dalam pemberian insentif, pembangunan infrastruktur, atau program sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat membawa dampak pada perkembangan wilayah dan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Freeport Indonesia. Namun demikian, setiap perubahan dalam kebijakan pemerintahan yang baru terpilih harus diimbangi dengan pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan nasional dan investasi asing.

Dalam konteks *Strength of Within-System Opposition*, perubahan kebijakan yang signifikan terkait lingkungan dan investasi bisa menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingan mereka terganggu. Oposisi dalam sistem politik atau dari kelompok-kelompok tertentu bisa menjadi penghalang utama dalam mewujudkan perubahan tersebut. Hal yang dapat diperkirakan ialah kemungkinan oposisi akan lebih banyak dari pada era Jokowi apabila melihat, partai yang mendukung calon pasangan ini. *Rule of Law*, implementasi kebijakan baru terkait lingkungan dan investasi, terutama yang berpotensi mempengaruhi perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, memerlukan kepastian hukum yang kuat. Kedaulatan hukum yang konsisten, jelas, dan adil diperlukan untuk mendukung perubahan kebijakan tersebut tanpa menimbulkan ketidakpastian. Pada dasarnya, tantangan besar dalam mengubah kebijakan terkait investasi dan lingkungan adalah korupsi. Hal

ini dapat memengaruhi implementasi kebijakan yang bersifat transparan dan adil. Korupsi bisa menjadi hambatan dalam mencapai visi mereka terkait keberlanjutan lingkungan dan pembangunan sosial.

Sementara visi dan misi mereka berpotensi membawa perubahan yang positif, tertera pula dalam visi dan misi bahwa mereka memastikan setiap kebijakan terkait investasi akan konsisten dan melibatkan dunia usaha, masyarakat sipil, dan Pemerintah Daerah secara setara, saling menghormati, dan dengan tujuan yang produktif bagi Indonesia. Tidak hanya itu, mereka berupaya meningkatkan investasi di Indonesia dengan merawat investor yang sudah ada serta merangkul investor baru, di mana insentif diberikan kepada keduanya secara adil dan transparan, memastikan investasi efektif dan efisien dengan menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* serta, meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi melalui manajemen satu pintu dalam bidang investasi untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan tambang yang sudah mapan di Papua. Perubahan dalam kebijakan yang berpotensi mengganggu atau mengubah kondisi operasional perusahaan tambang tersebut membutuhkan pendekatan yang cermat dan solusi yang mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh bagi semua pihak terkait.

4.3. Indonesia di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran menggambarkan potensi perubahan kebijakan ekonomi dan lingkungan yang dapat berdampak signifikan pada PT Freeport Indonesia, investasi McMoRan, dan pembangunan di Papua. Prabowo Subianto, dengan fokusnya pada kedaulatan ekonomi dan pembangunan wilayah, kemungkinan akan menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap sumber daya alam dan pertambangan (*Bersama Indonesia Maju*, n.d.). Ini bisa melibatkan

revisi kontrak karya yang berdampak pada operasional perusahaan tambang dan bagian dari keuntungan yang dibagikan, berpotensi memengaruhi PT Freeport Indonesia. Di sisi lain, kehadiran Prabowo-Gibran, yang mewakili generasi muda, dapat membawa perspektif inovatif dalam pembangunan Papua. Dalam visi mereka, fokus pada kemandirian ekonomi daerah dan inklusi sosial menonjol. Namun, perubahan kebijakan yang drastis tanpa koordinasi yang tepat dengan para pemangku kepentingan dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko politik bagi investasi dan pembangunan di Papua.

Cohesiveness of Government, dapat dilihat dari upaya untuk merevisi aturan yang menghambat investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan serta menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan menunjukkan perhatian pada aspek lingkungan. Namun, langkah-langkah ini juga harus sejalan dengan keberlanjutan operasional perusahaan tambang yang sudah mapan di Papua. Dengan adanya oposisi yang cukup kuat seperti PDIP yang merupakan partai pengusung paslon nomor 03, terdapat urgensi akan pendekatan matang dan dialog terbuka antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menyeimbangkan kedaulatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan operasional perusahaan tambang di Papua menjadi krusial. Tindakan yang terlalu drastis tanpa mempertimbangkan konsekuensi menyeluruhnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi industri tambang dan pembangunan di wilayah tersebut. Kesenambungan dan kesatuan dalam kebijakan pemerintahan, ketahanan terhadap oposisi dalam sistem, kedaulatan hukum yang kokoh, dan pemberantasan korupsi menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan visi mereka. Evaluasi menyeluruh terhadap dinamika pembangunan dan investasi di Papua, termasuk operasional PT Freeport Indonesia, diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, kepentingan

masyarakat, dan perlindungan. Apabila memang pasangan calon ini menang, perubahan kebijakan investasi mungkin tidak akan berbeda secara signifikan karena beliau menekankan akan melanjutkan program kerja Presiden Jokowi, apalagi Gibran merupakan anak kandung dari Presiden Jokowi (Ayyubi, 2023). Saya rasa, apabila pasangan calon ini terpilih tidak ada kebijakan yang akan berubah signifikan terkait *cohesiveness of government, strength of within-system opposition, rule of law, dan corruption*.

4.4. Indonesia di Bawah Kepemimpinan Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Sebagai calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD membawa visi pembangunan yang inklusif dan penekanan pada pemberdayaan ekonomi daerah (*Menuju Indonesia Unggul, n.d.*). Dalam konteks *cohesiveness of government*, visi ini dapat membawa implikasi terhadap PT Freeport Indonesia, investasi McMoRan, dan pembangunan di Papua. Ganjar Pranowo memang telah dikenal sebagai gubernur yang memprioritaskan pembangunan daerah, memfokuskan pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi tidak secara spesifik membahas investasi asing. Dalam konteks risiko politik, visi pemberdayaan ekonomi daerah yang diperjuangkan oleh Ganjar Pranowo mungkin mengakibatkan kebijakan lebih proaktif terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk di Papua. Upaya untuk memastikan manfaat yang lebih merata bagi daerah-daerah sumber daya alam, termasuk pengelolaan operasional perusahaan tambang, dapat menjadi fokus utama. Ini bisa mengarah pada revisi kontrak karya dan pengaturan ulang bagi perusahaan seperti PT Freeport Indonesia. Dalam menganalisis oposisi, apabila pasangan calon ini menang, kemungkinan akan banyak oposisi yang akan bergabung, jika dilihat berdasarkan 10 tahun ke belakang PDIP berkuasa.

Selain itu, Mahfud MD yang dikenal sebagai figur yang mendorong kedaulatan

hukum dan tata kelola yang baik dapat memengaruhi kebijakan terkait kontrak dan operasional perusahaan asing. Penekanan pada tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan pada regulasi merupakan prioritas Mahfud MD. Hal ini menekankan pentingnya kedaulatan hukum dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kontrak dan operasional perusahaan asing. Dalam hal ini, akan ada penekanan pada tata kelola yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, upaya untuk mengatur ulang kontrak atau menyesuaikan operasional perusahaan dengan kepentingan daerah bisa menimbulkan ketidakpastian bagi industri tambang dan investasi di Papua. Perubahan kebijakan yang signifikan perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidakpastian dalam kebijakan dan regulasi serta korupsi yang mungkin terjadi terlalu drastis dapat berdampak negatif pada investasi dan operasional perusahaan. Pada akhirnya, visi dan misi Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait risiko politik pada PT Freeport Indonesia dan investasi McMoRan akan diuji dalam kemampuannya untuk menawarkan kebijakan yang seimbang antara kedaulatan daerah, keberlanjutan investasi, dan pengembangan wilayah. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak terkait tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis dan pembangunan di Papua.

4.5. Potensi Risiko Politik dan Keamanan Bagi PT Freeport Indonesia

Gambaran visi dan misi dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia serta potensi implikasinya terhadap PT Freeport Indonesia, investasi McMoRan, dan pembangunan di Papua, menyoroti bagaimana setiap visi dan misi calon pemimpin berpotensi mengubah kebijakan ekonomi, lingkungan, dan

pembangunan di wilayah tersebut. Visi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap isu lingkungan dan pembangunan sosial. Fokus mereka pada keberlanjutan lingkungan dapat mengubah regulasi tambang yang lebih ketat dan berpotensi memengaruhi operasional PT Freeport Indonesia. Namun, fokus pada pembangunan di Papua mungkin membawa perubahan positif, diperlukan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan operasional perusahaan tambang. Sementara itu, visi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencerminkan kecenderungan kebijakan yang lebih protektif terhadap sumber daya alam dan kedaulatan ekonomi. Pendekatan ini dapat membawa risiko perubahan kontrak yang dapat mengganggu operasional PT Freeport Indonesia. Namun, upaya inovatif dalam pembangunan di Papua dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi daerah, tetapi perlu diperhatikan bahwa perubahan kebijakan yang drastis tanpa koordinasi yang tepat dapat menimbulkan ketidakpastian. Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dengan visi pemberdayaan ekonomi daerah dan penegakan hukum yang baik, juga dapat membawa perubahan kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang lebih transparan dan sesuai dengan regulasi berpotensi mengubah operasional perusahaan tambang. Namun, ketidakpastian terkait perubahan kebijakan yang drastis juga perlu diwaspadai agar tidak mengganggu investasi dan pembangunan di Papua.

Hasil analisa ketiganya menunjukkan kemungkinan adanya perubahan kebijakan dalam konteks lingkungan dan investasi asing. Dapat dikatakan bahwa ketiganya memiliki visi dan misi yang positif bagi negara, namun tidak sepenuhnya berdampak positif bagi perusahaan. Namun, hal ini perlu dicatat bahwa visi dan misi tersebut hanya sebatas janji yang belum tentu tercermin dalam kenyataan. Sering kali setelah terpilih, implementasi kebijakan dapat berbeda dengan apa yang dijanjikan selama

kampanye. Sementara visi dan misi yang disampaikan oleh para calon memiliki aspek positif untuk pembangunan dan lingkungan di Indonesia, perlu diingat bahwa perubahan kebijakan yang terlalu drastis dapat memberikan dampak negatif pada perusahaan, terutama yang telah berinvestasi dalam jangka panjang seperti PT Freeport Indonesia. Kestabilan kebijakan sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan dan kepastian bagi para investor. Selain itu, visi dan misi yang diutarakan belum tentu mencerminkan implementasi nyata di masa depan. Praktik politik yang sering terjadi adalah janji kampanye yang kemudian berubah atau tidak sepenuhnya dilaksanakan setelah memegang jabatan. Oleh karena itu, pentingnya adalah bagaimana para calon akan menerjemahkan visi dan misi mereka ke dalam kebijakan yang konsisten dan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Analisis terhadap potensi risiko *Nationalization and Expropriation* menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh kebijakan ini dalam konteks pemerintahan yang baru. Perlu diingat bahwa janji kampanye belum tentu mencerminkan kebijakan yang diimplementasikan setelah terpilih. Konsistensi antara visi kampanye dan tindakan nyata perlu diperhatikan karena perubahan kebijakan yang drastis dapat merugikan perusahaan yang telah melakukan investasi jangka panjang di Indonesia, seperti PT Freeport Indonesia. Kestabilan kebijakan menjadi krusial untuk memastikan kepercayaan investor. Selain itu, pentingnya konsistensi dan rencana yang matang dalam menerjemahkan visi dan misi menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia. Ini menyoroti bahwa terlalu sering janji kampanye tidak sepenuhnya terealisasi setelah memegang jabatan. Diperlukan kesadaran akan implikasi dari perubahan kebijakan terhadap keberlangsungan perusahaan dan investasi. Sementara visi dan misi para calon menjanjikan dampak positif dalam

pembangunan di Papua, tantangan politik yang berbeda memerlukan keseimbangan dan dialog yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis dan pembangunan di wilayah.

5. Kesimpulan

Analisis di atas memberikan gambaran komprehensif tentang PT Freeport Indonesia, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, isu-isu sosial, dan keamanan, serta implikasi politik dan kebijakan masa depan terhadap perusahaan tersebut. Dalam konteks pemilihan presiden yang akan datang, tiga pasangan calon menawarkan visi dan misi yang berpotensi memengaruhi perusahaan ini. Namun, kritik terhadap hal ini adalah bahwa sementara visi dan misi yang diungkapkan menjanjikan perubahan positif bagi pembangunan dan lingkungan di Indonesia, implementasinya belum tentu mencerminkan kenyataan. Pola di mana janji-janji kampanye sering kali tidak terwujud saat memegang jabatan sering kali terjadi. Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin untuk mengonversi visi dan misi mereka ke dalam kebijakan konkret yang konsisten dan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kebijakan yang terlalu drastis dapat memiliki dampak negatif bagi perusahaan, khususnya yang telah melakukan investasi dalam jangka panjang seperti PT Freeport Indonesia. Kestabilan kebijakan sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan dan untuk memberikan kepastian bagi para investor. Risiko politik dan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan setelah pemilihan presiden dapat mengganggu perencanaan investasi jangka panjang perusahaan multinasional seperti Freeport-McMoRan. Dalam menghadapi masa depan, keberlanjutan bisnis dan stabilitas investasi harus tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan yang diusulkan oleh para pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- “Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar | Indonesia Adil Makmur Untuk Semua”. (n.d.). Dipetik Desember 2023, dari <https://aminajadulu.com>
- Ayyubi, S. A. (2023, November 8). *Prabowo Ancam Investor Asing Jika Tak Mau Bangun Smelter di RI*. Diambil kembali dari Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231108/9/1712407/prabowo-ancam-investor-asing-jika-tak-mau-bangun-smelter-di-ri>
- “Ganjar Pranowo - Mahfud MD | Menuju Indonesia Unggul.”. (n.d.). Dipetik Desember 2023, dari <https://visimisiganjarmahfud.id>
- Muliawati, F. D. (2023, Oktober 20). *Mau Nambah Saham di Freeport, Pemerintah Ngaku Lagi Negosiasi*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231020190224-4-482436/mau-nambah-saham-di-freeport-pemerintah-ngaku-lagi-negosiasi>
- “Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka | Bersama Indonesia Maju.”. (n.d.). Dipetik Desember 2023, dari <https://prabowogibran2.id>
- Puspadini, M. (2023, Desember 11). *Anies Baswedan: Asing Tahu Kondisi Kita, Gak Bisa Bohong!* Dipetik Desember 2023, dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231211144341-4-496195/anies-baswedan-asing-tahu-kondisi-kita-gak-bisa-bohong>
- Rahayu, I., Barkah, C. S., & Novel, N. J. (2022, Januari). Studi Kasus Analisis Proses Negosiasi PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/357801062_STUDI_KASUS_ANALISIS_PROSES_NEGOSIASI_PT_FREEPORT_DENGAN_PEMERINTAH_INDONESIA
- Ramadhani, A. N. (2022). Kajian Kasus Freeport Sebagai Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Menggunakan Pendekatan Neomarxisme. https://www.researchgate.net/publication/371681103_Kajian_Kasus_Freeport_Sebagai_Ketimpangan_Pendapatan_di_Indonesia_Menggunakan_Pendekatan_Neomarxisme
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.